



# PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 1, Telp.(0534) 32160 Kode Pos 78851  
Ketapang - Kalimantan Barat

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



## KATA PENGANTAR

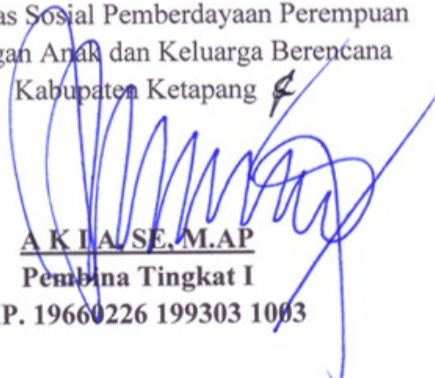
Puji syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa atas Rahmat dan karuniaNya sehingga terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis dimaksudkan sebagai alat ukur pengendali program dan kegiatan berdasarkan Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026. Hasil Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang ini secara garis besar mengupas tentang perencanaan Kinerja dan Capaian Program serta Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa lima (5) tahun kedepan (2021-2026) yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Strategis serta Kebijakan Program Kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.

Diharapkan Penyusunan Rencana Strategis ini ini dapat menjadi tolak ukur target kinerja pada pelaksanaan pencapaian Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

Ketapang, Agustus 2021

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Ketapang



**A. K. I. A. SE. M. AP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660226 199303 1003

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II Gambaran Pelayanan SKPD</b> .....	<b>5</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	5
2.2 Sumber Daya SKPD.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	16
Tabel TC-23 Pencapai Kinerja Pelayanan SKPD .....	17
Tabel TC-24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD.....	21
2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	27
<b>BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi</b> .....	<b>28</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	36
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	38
<b>BAB IV Tujuan dan Sasaran</b> .....	<b>38</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	38
Tabel TC-25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	39
<b>BAB V Strategi dan Arah Kebijakan</b> .....	<b>40</b>
Tabel TC-26 Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan.....	40
<b>BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan</b> .....	<b>41</b>
6.1 Rencana Program Tahun 2021-2026.....	41
Tabel TC-27 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	49
<b>BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan</b> .....	<b>64</b>
Tabel TC-28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	64
<b>BAB VIII Penutup</b> .....	<b>65</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang adalah Dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan serta belanja sektor sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan yaitu 2021-2026

Rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang, Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Barat dan Rencana Strategis Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) selanjutnya Rencana Strategis tersebut menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD, sedangkan Fungsi Rencana Strategis adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan kerja sehingga pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan.

### 1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif Terhadap Wanita (CEDAW);
10. Undang-Undang Nomor 68 tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera;
13. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 52);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penetapan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selama 5 (lima) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah :

1. Memberikan arah pembangunan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang pada periode tahun 2021-2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

3. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
4. Sebagai instrument pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan Rencana Strategis ini dengan sistematika meliputi :

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah perlu dilaksanakannya pembangunan di Sektor Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Sebagai dasar kekuatan hukum atau acuan dalam pembentukan, penyelenggaraan, penyusunan dan pengendalian pada Sektor Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Sektor Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selama 5 (lima) tahun serta bertujuan mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Kerangka dasar penulisan Rencana Strategis.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Merupakan penjabaran tugas, fungsi dan bagaimana struktur organisasi suatu SKPD.

#### **2.2 Sumber Daya SKPD**

Merupakan data jumlah pegawai dan fasilitas penunjang operasional SKPD

#### **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Gambaran seberapa jauh tingkat kinerja pelayanan yang di jalankan dalam satu Tahun Anggaran pada SKPD**

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.**

### **BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.**

Pemahaman tentang apa yang menjadi pokok permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Menyelenggarakan Visi Misi SKPD dengan Visi Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

#### **3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis Provinsi/Kabupaten**

Tentang bagaimana pelaksanaan Rencana Strategis SKPD yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian.

- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
Tidak ada keterkaitan khusus dengan rencana tata ruang wilayah, namun lebih dalam penanganan masalah-masalah Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis  
Apa yang harus dioptimalkan untuk dapat mengatasi tentang hal - hal yang berkaitan dengan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD  
Apa yang hendak dicapai oleh SKPD dalam Jangka Menengah.

**BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh SKPD sebagai aktualisasi untuk mewujudkan Visi dan Misi SKPD.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Merupakan paparan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

# **DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) pasal 19 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf 3 maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan acuan dan pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta memuat arah kebijakan keuangan daerah. Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam perkembangannya penetapan RPJMD daerah tidak hanya diperlukan untuk perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja (LKj) yang didahului dengan penyusunan rencana kinerja dan dokumen penetapan kinerja tiap tahunnya.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyadari sudah menjadi keharusan atau kewajiban, hal ini tidak semata karena adanya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maupun Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah (AKIP) serta PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah akan tetapi kewajiban Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kewenangan yang dipercayakan kepadanya, sudah selaras dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Clean government and good governance*).

#### **KEDUDUKAN**

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang. Peraturan Daerah tersebut ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.



## **FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

Tugas pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang sesuai dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut :

### **Dinas**

- 1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi wewenang daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas sekretariat dan masing-masing bidang, sub bagian dan seksi.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan.
- e. kegiatan dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

### **II. Sekretariat Dinas:**

- 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam masing-masing sub bagian.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyusunan perencanaan dinas.
  - b. Penyelenggaran urusan umum dan perlengkapan dinas;
  - c. Penyelenggaran urusan kepegawaian dinas
  - d. Penyelenggaran urusan keuangan dinas.
  - e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan.
  - f. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan, sub bagian keuangan dan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas.

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat Dinas terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program

### **III. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

- 1) Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas masing-masing seksi.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
  - b. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
  - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan sosial dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
  - d. Penyelenggaraan kegiatan sosial dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
  - e. Pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pemberdayaan sosial dan seksi kelembagaan sosial.
  - f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sosial dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial.
- b. Seksi Kelembagaan Sosial.

### **IV. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pelindungan dan Jaminan Sosial**

- 1) Bidang Rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas masing-masing seksi.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya bidang Rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis tehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial
  - b. Penyusunan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
  - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial
  - d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
  - e. Pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi rehabilitasi rehabilitasi sosial dan seksi perlindungan dan jaminan sosial.

- f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

#### **V. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

- 1) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas masing-masing seksi.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - b. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - e. Pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi kesetaraan gender dan seksi perlindungan perempuan dan anak.
  - f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- a. Seksi Kesetaraan Gender.
- b. Seksi Perlindungan Perempuan.
- c. Seksi Perlindungan Anak.

#### **VI. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- 1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas masing-masing seksi.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  - b. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  - d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  - e. Pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Penduduk
- b. Seksi Keluarga Berencana
- c. Seksi Bina Keluarga Sejahtera

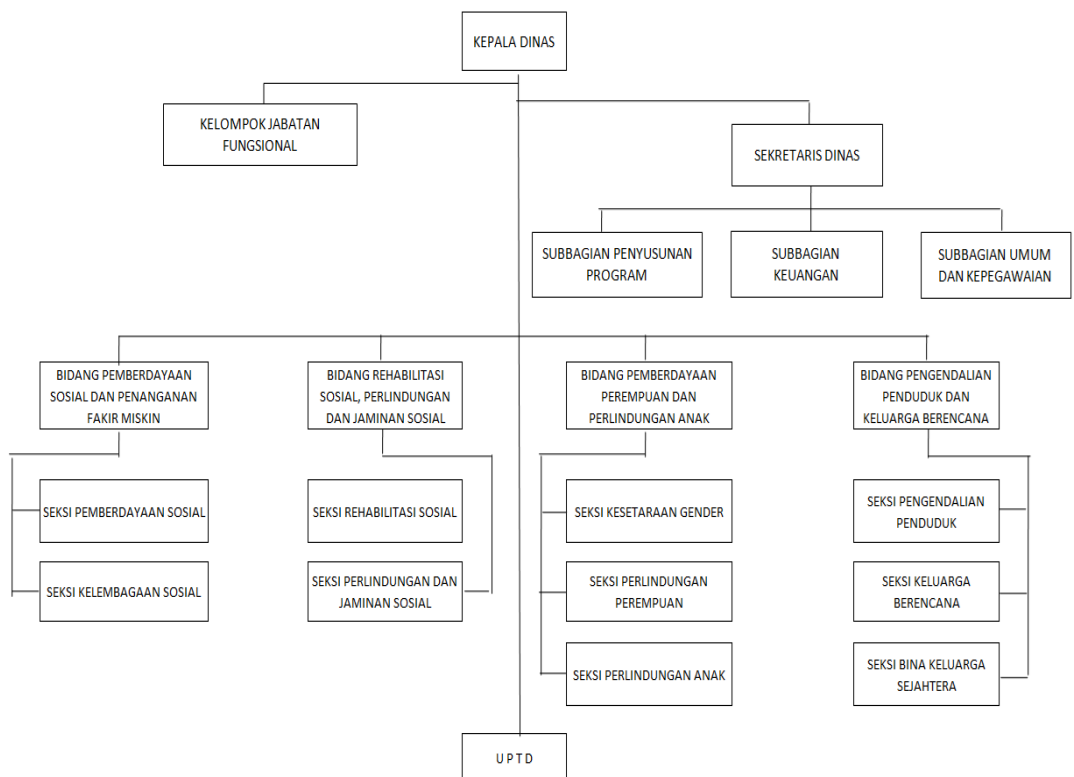
**VII. Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, dan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- 2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing.

**STRUKTUR ORGANISASI**

Berikut dibawah ini adalah bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.

Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Ketapang  
Sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor 56 Tahun 2016



## 2.2. SUMBER DAYA

Pada tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi didukung oleh 53 orang pegawai dan 39 orang Tenaga Honorer dengan komposisi sebagai berikut:

### 1). Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 53 orang.

(1).Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang terdiri dari:

- a). Golongan I = - Orang
- b). Golongan II = 9 Orang
- c). Golongan III = 31 Orang
- d). Golongan IV = 13 Orang

(2).Berdasarkan kualifikasi pendidikan formal terdiri dari:

- a). S2 = 11 Orang
- b). S1 = 20 Orang
- c). D.IV = 6 Orang
- d). D.III = 3 Orang
- e). D.II = - Orang
- f). DI = - Orang
- g). SLTA = 13 Orang
- h). SLTP = - Orang
- i). SD = - Orang

(3).Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

- a). Eselon II = 1 Orang
- b). Eselon III = 5 Orang
- c). Eselon IV = 13 Orang
- d). Eselon V = - Orang

Tabel 2.1  
Perkembangan Jumlah Pegawai  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang

NO	TAHUN	JUMLAH	KET
1.	Tahun 2016	58 orang	
2.	Tahun 2017	84 orang	
3.	Tahun 2018	47 orang	
4.	Tahun 2019	51 orang	
5.	Tahun 2020	47 orang	
6.	Tahun 2021	53 orang	

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kab. Ketapang Tahun 2021

Tabel 2.2  
Kondisi Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO	GOLONGAN KEPANGKATAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Golongan IV	4	9	7	12	12	13
2.	Golongan III	40	59	29	29	27	31
3.	Golongan II	14	16	11	10	8	9
4.	Golongan I	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>84</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>53</b>

*Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
Dan Keluarga Berencana Kab. Ketapang tahun 2021*

Tabel 2.3  
Perkembangan Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga  
Berencana Kab. Ketapang

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN						KET
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tamatan S-2	4	4	3	10	12	11	
2	Tamatan S-1	15	31	22	19	16	20	
3	Tamatan D-IV	-	-	2	3	3	6	
4	Tamatan DIII	3	7	4	3	3	3	
5	Tamatan DII	-	-	-	-	-	-	
6	Tamatan DI	-	-	-	-	-	-	
5	Tamatan SLTA/ sederajat	35	42	16	16	13	13	
6	Tamatan SLTP/ sederajat	1	-	-	-	-	-	
7	Tamatan SD/ sederajat	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>84</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>53</b>	

*Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
Dan Keluarga Berencana Kab. Ketapang tahun 2021*

## 2. Sarana dan Prasarana

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada tabel dibawah dimana aset daripada sarana dan prasarana tersebut setelah dilakukan rekonsiliasi oleh bagian umum di SKPD maka aset Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Ketapang sebagai berikut :

Tabel 2.4  
 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana  
 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan  
 Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang

<b>REKAP BELANJA MODAL</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN</b>
<b>TANAH</b>	<b>60.841.000,00</b>
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah/Dinas Sosial PPPA dan KB	18.000.000,00
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah/Gedung LBK	4.933.000,00
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	37.908.000,00
<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>5.424.654.021,00</b>
Alat Berat	-
Alat Angkutan	2.814.519.113,00
Alat Bengkel dan alat Ukur	-
Alat Pertanian dan Peternakan	-
Alat Kantor dan rumah tangga	2.610.134.908,00
Alat Studio dan komunikasi	-
Alat Kedokteran	-
Alat Laboratorium	-
Alat Keamanan	-
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>18.114.374.101</b>
<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>3.000.000,00</b>
Jalan dan Jembatan	-
Bangunan Air (Irigasi)	-
Jaringan	3.000.000,00
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>50.000.000,00</b>
Buku Perpustakaan	50.000.000,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-
Hewan Ternak dan Tumbuhan	-
<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>23.607.869.122</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>23.607.869.122</b>

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kab. Ketapang Tahun 2021

Tabel 2.5  
Rincian Sarana dan Prasarana  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang

Jenis Sarana dan Prasarana	LOKASI	LUAS	Tahun Perolehan	Jumlah Perolehan
<b>TANAH</b>				<b>60.841.000,00</b>
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah/ Dinas Sosial PPPA dan KB	JL. Hos Cokroaminoto No. 1 Ketapang	1.890 m <sup>2</sup>	1983	18.000.000,00
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah/ Gedung LBK	JL. Gatot Subroto Payak Kumang	690 m <sup>2</sup>	2007	4.933.000,00
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	JL. Hos Cokroaminoto No. 1 Ketapang	1.404 m <sup>2</sup>	2007	37.908.000,00
Jumlah				<b>60.841.000,00</b>

Tabel 2.6  
Rincian Sarana Prasarana Aset Peralatan dan Mesin  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang

Jenis Sarana dan Prasarana	Merk/ Type	Volume	Tahun Perolehan	Jumlah Perolehan	Keterangan
<b>Peralatan dan Mesin</b>				<b>5.424.654.021</b>	
<b>Alat Angkutan</b>				<b>2.814.519.113</b>	
- Kendaraan Roda 4	Mitsubishi Triton	1 Buah	2019	388.692.500,00	Kepala Dinas
- Kendaraan Roda 4	Kijang Innova	1 Buah	2012	301.905.000,00	Sekretaris Dinas
- Kendaraan Roda 4	Chevrolet	1 Buah	2018	654.993.413,00	Kabid Dalduk dan KB
- Kendaraan Roda 4	Ford Ranger	1 Buah	2011	327.706.000,00	Sekretariat
- Kendaraan Roda 4	Mitsubishi Triton	1 Buah	2011		Bidang Dalduk dan KB
- Kendaraan Roda 4	Isuzu	1 Buah	2014		Bidang Dalduk dan KB
- Sepeda Motor	Honda Mega Pro 160 D	1 Buah	2009	14.700.000,00	Kabid Dalduk dan KB
- Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1 Buah	2009	17.600.000,00	Kasi Pemberdayaan Sosial
- Sepeda Motor	Honda/NF 125 TR	1 Buah	2009	13.700.000,00	Staf Kelembagaan Sosial
- Sepeda Motor	Revo Absolut	46 Buah	2009	682.445.000,00	PLKB Kecamatan
- Sepeda Motor	RX King	3 Buah	2010	64.119.000,00	Staf Dinas Sosial PPPA dan KB
- Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	1 Buah	2010	13.783.000,00	Staf Dinas Sosial PPPA dan KB
- Sepeda Motor	Supra X 125 Helm In	1 Buah	2014	17.211.700,00	Kabid Resos Perjamsos
- Sepeda Motor	Verza	1 Buah	2014	17.413.300,00	Kasubbag UKP
- Sepeda Motor	Supra X 125 CC	1 Buah	2015	17.396.200,00	Staf Pemsos
- Sepeda Motor	Kawasaki KLX	1 Buah	2015	28.900.000,00	Staf Jamsos



Jenis Sarana dan Prasarana	Merk/Type	Volume	Tahun Perolehan	Jumlah Perolehan	Keterangan
- Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z1	2 Buah	2017	36.390.000,00	Staf Dinsos, Kasi Perlindungan Anak
- Sepeda Motor	Aerox	2 Buah	2017	46.900.000,00	Kasi Dalduk, Kasubbag Sungram
- Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1 Buah	2019	29.131.000,00	Kepala Dinas
- Sepeda Motor	Yamaha Mio3	2 Buah	2019	36.770.000,00	Kasi KB, Kasi Kelembagaan
- Sepeda Motor	Jupiter Z1	3 Buah	2019	58.737.000,00	Kassubag Keuangan, Kasi Jamsos, Staf UKP
- Sepeda Motor	Honda CBR 150	1 Buah	2016	26.676.000,00	UKP
- Sepeda Motor	Aerox	1 Buah	2016	19.350.000,00	Sekretariat
<b>Jumlah Alat Angkutan</b>		<b>75 Buah</b>		<b>2.814.519.113</b>	
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				<b>2.610.134.908</b>	

Tabel 2.7  
Rincian Sarana dan Prasarana Aset Gedung dan Bangunan  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Ketapang

Jenis Sarana dan Prasarana	Lokasi	Luas	Tahun Perolehan	Kondisi	Jumlah Perolehan	Keterangan
<b>Gedung dan Bangunan</b>					<b>18.114.374.101</b>	
- Gedung Garasi/Pool Permanen	Jl. Hos Cokroaminoto No. 1 Ketapang	1.890 m <sup>2</sup>	2017	Rusak Ringan	190.521.000,00	Garasi Kendaraan Dinas
- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Hos Cokroaminoto No. 1 Ketapang	1.890 m <sup>2</sup>	2007	Rusak Ringan	12.258.377.969	
- Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Jl. Gatot Subroto	690 m <sup>2</sup>	2007	Rusak Ringan	11.460.000,00	
- Makam Bersejarah	Jl. Bridgen Katamso		2007	Rusak Ringan	713.227.000,00	Pagar Taman Makam Pahlawan
- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Hos Cokroaminoto No. 1 Ketapang	1.890 m <sup>2</sup>	2008	Rusak Ringan	90.250.000,00	
- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Gatot Subroto	690 m <sup>2</sup>	2009	Rusak Ringan	149.103.600,00	
- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan lain-lain	Kec. Delta Pawan, Benua Kayong, Muara Pawan		2012	Rusak Ringan	574.591.452,00	Gedung Kantor Balai Penyuluh KB Kecamatan

Jenis Sarana dan Prasarana	Lokasi	Luas	Tahun Perolehan	Kondisi	Jumlah Perolehan	Keterangan
- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan lain-lain	Kec MHU, Kendawangan, MHS		2013	Rusak Ringan	614.583.300,00	Gedung Kantor Balai Penyuluh KB Kecamatan
- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan lain-lain	Kec. Air Upas		2014	Rusak Ringan	202.500.000,00	Gedung Kantor Balai Penyuluh KB Kecamatan
- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan lain-lain	Kec. Nanga Tayap	2.451 m <sup>2</sup>	2014	Rusak Ringan	202.295.000,00	Gedung Kantor Balai Penyuluh KB Kecamatan
- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan lain-lain	Kec. Jelai Hulu		2014	Rusak Ringan	202.412.000,00	Gedung Kantor Balai Penyuluh KB Kecamatan
- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan lain-lain	Kec. Sungai Melayu Rayak		2014	Rusak Ringan	202.353.000,00	Gedung Kantor Balai Penyuluh KB Kecamatan
- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan lain-lain	Kec. Singkup		2014	Rusak Ringan	202.333.000,00	Gedung Kantor Balai Penyuluh KB Kecamatan
- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kec. Simpang Hulu	11.557 m <sup>2</sup>	2015	Rusak Ringan	238.022.000,00	Balai Penyuluh KB
- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kec. Simpang Dua	14.000 m <sup>2</sup>	2015	Rusak Ringan	238.938.000,00	Balai Penyuluh KB
- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kec. Tumbang Titi		2015	Rusak Ringan	221.775.000,00	Balai Penyuluh KB
- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kec. Sandai	22.380 m <sup>2</sup>	2015	Rusak Ringan	222.272.000,00	Balai Penyuluh KB
- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kec. Marau		2015	Rusak Ringan	225.000.000,00	Balai Penyuluh KB
- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Kec. Sungai Laur	20.000 m <sup>2</sup>	2015	Rusak Ringan	208.826.000,00	Balai Penyuluh KB

Jenis Sarana dan Prasarana	Lokasi	Luas	Tahun Perolehan	Kondisi	Jumlah Perolehan	Keterangan
- Bangunan Gedung Kantor Permanen	JL. Hos Cokroaminoto No. 1 Ketapang	1.890 m <sup>2</sup>	2016	Baik	108.849.000,00	Bangunan Gedung Kantor
- Bangunan Gedung dan Rumah Dinas	Kec. Manis Mata, Hulu Sungai, Pemahan		2016	Baik	720.006.780,00	Gedung Kantor Balai Penyuluh KB Kecamatan
- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Posyandu di Kecamatan		2016	Baik	150.000.000,00	Posyandu di Kecamatan
- Bangunan Gedung Kantor Permanen	JL. Hos Cokroaminoto No. 1 Ketapang	1.890 m <sup>2</sup>	2020	Baik	166.678.000,00	Ruang Tunggu Pelayanan Publik
Jumlah					<b>18.114.374.101</b>	

Tabel 2.8  
Rincian Sarana dan Prasarana Aset irigasi dan Jaringan  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang

Jenis Sarana dan Prasarana	LOKASI	Tahun Perolehan	Jumlah Perolehan	Keterangan
<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>			<b>3.000.000,00</b>	
- Jaringan Telepon di Atas Tanah Kapasitas Kecil	JL. Hos Cokroaminoto No. 1 Ketapang	2017	3.000.000,00	Jaringan internet speedy 2 buah terdiri dari: 2 set router, 2 set microtic, 2 kabel UTP, 2 konektor
Jumlah			<b>3.000.000,00</b>	

Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kab. Ketapang tahun 2021

### 2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang yaitu melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga melaksanakan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, selain itu menjalankan tugas untuk melakukan pemberdayaan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi perempuan yang juga menuntut penguatan mengingat fungsinya yang semakin relevan di tengah spirit pengarusutamaan gender saat ini. Kebijakan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di dalam masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta menjaga kesehatan reproduksi, termasuk dalam keluarga berencana. Secara umum tentang capaian kinerja pelayanan dan Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tergambar pada Tabel TC-23 dan TC-24 Terlampir :

TABEL TC-23

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	<b>Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>																		
1	Persentase PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial						0,98%	20,00 %	20,00 %			0,48%		-			48,98%		-
2	Persentase Penurunan PMKS						2,50%	3,00%	3,50%			29,50%		-			14,75%		-
3	Jumlah Bantuan Sosial Daerah Kumuh/Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)						100 Buah	200 Buah	200 Buah			83 Buah		-			83,00%		-
4	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)						17.989 KSM/KPM	11.000 KSM/KPM	12.000 KSM/KPM			18.017 KSM/KPM		-			100,56%		-
5	Persentase PMKS Penerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Ekonomi Sejenis Lainnya						4,50 %	4,50 %	5,00 %			3,04%	4,50 %	-			68%	100%	-
II	<b>Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Panti Asuhan</b>																		
1	Persentase Panti Sosial, WKBSM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lainnya yang dibantu dan difasilitasi						20,00%	20,00%	20,00%			20,00%	20,00%	-			100%	100%	-
III	<b>Meningkatkan Pembinaan Pelayanan dan Rehabilitasi Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>																		
1	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Tidak Potensial Menerima Jaminan Sosial						4,00%	4,00%	4,50%			0,14%	4,00%	-			3,50%	100%	-
2	Persentase Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Narapidana dan Pekerja Seks Komersial)						12,00%	14,00%	15,00%			9,31%		-			77%		-
3	Persentase Pelayanan dan Perlindungan Sosial Hukum Bagi Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak						50,00%	50,00%	50,00%			50,00%	50,00%	-			100%	100%	-
4	Persentase Peningkatan Konseling dan Kampanye Sosial Bagi PMKS						20,00%	20,00%	20,00%			20,00%	20,00%	-			100%	100%	-

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>IV</b>	<b>Meningkatnya Peranan Perempuan</b>																		
1	Persentase Peningkatan Jumlah Pekerja Perempuan						40,00%	50,00%	50,00%			15,51%		-			38,76%		-
<b>V</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Perempuan</b>																		
1	Persentase Penanganan KDRT yang terselesaikan						40,00%	40,00%	40,00%			87,50%	40,00%	-			220%	100%	-
2	Angka PIG						35,00%	35,00%	35,00%			0,66%	0,66%	-			1,88%	1,88%	-
<b>VI</b>	<b>Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak</b>																		
1	Tercapainya Predikat Evaluasi Kabupaten Layak Anak						35,00%	35,00%	35,00%			20,00%	20,00%	-			57%	57%	-
<b>VII</b>	<b>Pemakaian Kontrasepsi (CPR)</b>																		
1	Cakupan Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Aktif a. Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2017  b. Jumlah Target Sasaran Peserta KB Aktif Tahun 2017  c. Jumlah Pasangan Usia Subur Pada Tahun 2017						65,00%	65,00%	70,00%			62,74%	61,68%	-			95,00%	95,00%	-
<b>VIII</b>	<b>Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi</b>																		
1	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) a. Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi (tidak ber KB) pada tahun 2017 b. Jumlah PUS pda Tahun 2017						13,00%	13,00%	12,00%			14,57%	14,57%	-			82,36%	82,36%	-
2	Rasio Jumlah Petugas KB (2 Desa: 1 PLKB) a. Jumlah PKB tahun 2017 b. Jumlah Desa Kabupaten Ketapang tahun 2017						10,00%	10,00%	10,00%			8,78%	10,00%	-			85,19%	100%	-
3	Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS) a. Jumlah Kelompok Kegiatan yang dibina Tahun 2017 b. Jumlah Kelompok Kegiatan yang ada tahun 2017						20,00%	20,00%	20,00%			3,08%	15,21%	-			19,00%	76,00%	-
4	Meningkatnya Jumlah Kampung Kb				100%	100%	100%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100%	100%	-	-	-

**Tabel T-C. 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan**  
**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang**

No	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.300.862.000,00</b>	<b>1.396.456.932,00</b>	<b>1.174.357.100,00</b>	<b>674.088.800,00</b>	<b>775.202.120,00</b>	<b>1.255.396.031,00</b>	<b>1.349.850.276,00</b>	<b>1.131.200.612,00</b>	<b>652.735.922,00</b>	-	<b>96,50</b>	<b>96,66</b>	<b>96,33</b>	<b>96,83</b>	
	- Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	2.500.000,00	3.000.000,00	74.201.400,00	90.500.000,00	104.075.000,00	1.873.000,00	3.000.000,00	74.200.000,00	90.500.000,00		74,92	100,00	100,00	100,00	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	150.000.000,00	114.080.000,00	130.400.000,00	120.200.000,00	138.230.000,00	63.882.587,00	83.804.716,00	99.857.048,00	99.362.026,00		42,59	73,46	76,58	82,66	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.400.000,00	12.000.000,00	20.600.000,00	7.500.000,00	8.625.000,00	5.751.500,00	8.076.900,00	16.967.200,00	7.451.300,00		61,19	67,31	82,37	99,35	
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	12.740.000,00		70.000.000,00	80.500.000,00		10.465.000,00		69.997.989,00			82,14		100,00	
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	82.000.000,00	43.000.000,00	49.450.000,00	10.000.000,00	9.993.642,00	75.829.300,00	42.999.400,00		100,00	99,94	92,47	100,00	
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	52.541.000,00	41.136.425,00	49.560.700,00	22.603.200,00	25.993.680,00	30.811.950,00	40.735.006,00	49.380.000,00	22.601.323,00		58,64	99,02	99,64	99,99	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	41.623.500,00	46.595.000,00	20.000.000,00	23.000.000,00	36.767.700,00	40.982.882,00	45.627.100,00	20.000.000,00		73,54	98,46	97,92	100,00	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.750.000,00	4.312.500,00	7.499.300,00	9.996.600,00	9.856.000,00	3.749.300,00		74,99	99,97	98,56	99,98	
	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	68.921.000,00	116.367.500,00			0,00	82.941.000,00	116.307.000,00				120,34	99,95			
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	57.920.000,00	10.000.000,00	17.270.600,00	19.861.190,00	7.140.000,00	53.125.000,00	9.715.000,00	17.270.600,00		59,50	91,72	97,15	100,00	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	30.000.000,00			0,00	39.304.000,00	29.991.500,00				157,22	99,97			
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.500.000,00	51.000.000,00	47.925.000,00	55.113.750,00	6.941.000,00	10.498.000,00	50.712.000,00	47.920.000,00		69,41	99,98	99,44	99,99	
	- Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	650.000.000,00	506.880.000,00	600.000.000,00	137.500.000,00	158.125.000,00	623.976.994,00	504.029.030,00	599.661.964,00	137.468.984,00		96,00	99,44	99,94	99,98	
	- Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	75.000.000,00	98.769.507,00	100.000.000,00	93.840.000,00	107.916.000,00	74.825.000,00	97.405.000,00	99.395.000,00	93.415.000,00		99,77	98,62	99,40	99,55	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	175.500.000,00	331.440.000,00				263.682.000,00	331.440.000,00				150,25	100,00			
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>608.684.000,00</b>	<b>723.395.000,00</b>	<b>807.772.500,00</b>	<b>268.185.200,00</b>	<b>308.412.980,00</b>	<b>436.863.500,00</b>	<b>710.794.000,00</b>	<b>802.043.850,00</b>	<b>266.852.900,00</b>	-	71,77	98,26	99,29	99,50	
	- Pembangunan Gedung Kantor	84.333.000,00	496.645.000,00			0,00	190.521.000,00	490.908.000,00				225,92	98,84			
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	192.000.000,00		515.757.500,00		0,00	36.390.000,00		513.330.500,00			18,95		99,53		
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	119.177.000,00	21.930.000,00	11.050.000,00		0,00	40.000.000,00	15.160.000,00	11.050.000,00			33,56	69,13	100,00		
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	20.000.000,00	6.000.000,00	6.900.000,00		-	19.605.000,00	6.000.000,00				98,03	100,00	
	- Pengadaan Mebeleur	74.180.000,00	77.820.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	8.625.000,00	68.180.000,00	77.800.000,00	9.948.400,00	7.500.000,00		91,91	99,97	99,48	100,00	
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	16.000.000,00	20.000.000,00	105.000.000,00	180.000.000,00	207.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	103.180.000,00	178.823.000,00		18,75	100,00	98,27	99,35	

No	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	92.994.000,00	76.000.000,00	125.965.000,00	63.929.600,00	73.519.040,00	81.659.500,00	75.935.000,00	125.335.450,00	63.774.900,00		87,81	99,91	99,50	99,76	
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	3.255.600,00	3.743.940,00	7.918.000,00	14.991.000,00	9.920.000,00	3.255.000,00		52,79	99,94	99,20	99,98	
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	15.000.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	8.625.000,00	9.195.000,00	16.000.000,00	9.674.500,00	7.500.000,00		61,30	100,00	96,75	100,00	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>39.000.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya	39.000.000,00				0,00										
	- Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	-				0,00										
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-undangan	-				0,00										
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan</b>	<b>87.400.000,00</b>	<b>71.927.500,00</b>	<b>231.000.000,00</b>	<b>159.812.000,00</b>	<b>183.783.800,00</b>	<b>55.640.000,00</b>	<b>71.685.500,00</b>	<b>229.539.673,00</b>	<b>169.805.499,00</b>	-	63,66	99,66	99,37	106,25	
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000,00	21.327.500,00	121.000.000,00	104.812.000,00	120.533.800,00	26.720.000,00	21.327.500,00	119.565.200,00	104.811.500,00		106,88	100,00	98,81	100,00	
	- Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	-				0,00										
	- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan	-	-			0,00		-								
	- Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	-	12.800.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00	28.750.000,00		12.800.000,00	64.999.533,00	24.995.084,00			100,00	100,00	99,98	
	- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	20.000.000,00	12.800.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	34.500.000,00	8.400.000,00	12.800.000,00	29.974.940,00	29.998.915,00		42,00	100,00	99,92	100,00	
	- Penyusunan Laporan Belanja SKPD	-								10.000.000,00						
	- Penyusunan laporan ketatausahaan /laporan bulanan kepegawaian	21.200.000,00	12.500.000,00			0,00	10.600.000,00	12.379.000,00				50,00	99,03			
	- Penunjang Pengelolaan Aset dan Persediaan SKPD	21.200.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00		0,00	9.920.000,00	12.379.000,00	15.000.000,00			46,79	99,03	100,00		
	- Penyusunan RKA dan DPA	-				0,00										
	- Penyusunan Anggaran dan Perubahan Anggaran	-				0,00										
	- Penyusunan Renja	-				0,00										
	- Penyusunan Renstra	-				0,00										
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Data / Informasi</b>	<b>19.453.900,00</b>	<b>15.315.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>109.845.815,00</b>	<b>386.500.000,00</b>	<b>19.453.900,00</b>	<b>15.315.000,00</b>	<b>137.467.900,00</b>	<b>109.734.630,00</b>	-	100,00	100,00	98,19	99,90	

No	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Penyusunan dan pengumpulan data Informasi kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	19.453.900,00	15.315.000,00	100.000.000,00	74.635.815,00	255.500.000,00	19.453.900,00	15.315.000,00	98.117.900,00	74.549.630,00		100,00	100,00	98,12	99,88	
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan	-		40.000.000,00	35.210.000,00	131.000.000,00			39.350.000,00	35.185.000,00				98,38	99,93	
	- Fasilitas Penunjang Pengelolaan Website SKPD	-														
	- Fasilitas Penunjang Pengembangan Data Informasi	-														
<b>7</b>	<b>Program Pemberdayaan, Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya</b>	<b>1.804.425.000,00</b>	<b>1.743.893.780,00</b>	<b>2.825.791.000,00</b>	<b>864.875.333,33</b>	<b>994.606.633,33</b>	<b>285.638.200,00</b>	<b>1.601.993.435,00</b>	<b>2.715.114.607,00</b>	<b>816.213.706,00</b>	-	15,83	91,86	96,08	94,37	
	- Fasilitas Managemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (KUBE)	1.620.995.000,00	735.962.300,00	1.187.000.000,00	60.986.500,00	70.134.475,00	55.565.500,00	645.159.900,00	1.171.979.400,00	59.786.500,00		3,43	87,66	98,73	98,03	
	- Observasi dan Identifikasi calon lokasi Relokasi KAT	-	53.091.000,00	304.868.000,00	7.610.000,00	8.751.500,00		50.918.000,00	234.235.149,00	7.610.000,00			95,91	76,83	100,00	
	- Fasilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Operasional Rastra )	-		585.500.000,00	61.682.833,33	70.935.258,33			585.039.900,00	60.994.300,00				99,92	98,88	
	- Monitoring evaluasi dan pelaporan Rehsos RTLH dan Pembangunan sarana lingkungan	75.000.000,00	61.815.000,00	50.000.000,00	12.730.000,00	14.639.500,00	74.770.000,00	60.050.800,00	49.700.000,00	9.378.000,00		99,69	97,15	99,40	73,67	
	- Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Keluarga Harapan	108.430.000,00	893.025.480,00	698.423.000,00	721.866.000,00	830.145.900,00	155.302.700,00	845.864.735,00	674.160.158,00	678.444.906,00		143,23	94,72	96,53	93,98	
<b>8</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>2.075.071.700,00</b>	<b>765.633.429,00</b>	<b>1.729.227.285,00</b>	<b>18.913.333.983,00</b>	<b>758.436.102,50</b>	<b>200.122.500,00</b>	<b>741.145.023,00</b>	<b>1.677.032.950,00</b>	<b>16.243.783.060,00</b>	-	9,64	96,80	96,98	85,89	
	- Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi perdagangan perempuan dan anak	58.298.700,00	33.409.495,00	50.000.000,00	27.225.000,00	31.308.750,00	41.808.200,00	30.269.240,00	49.058.165,00	27.041.195,00		71,71	90,60	98,12	99,32	
	- Verifikasi dan Validasi Penerima Manfaat Jaminan Sosial Nasional (Pendataan Rastra )	-		369.837.000,00	75.834.000,00	87.209.100,00			359.943.500,00	33.920.000,00				97,32	44,73	
	- Peningkatan kualitas Pelayanan Sarana & Prasarana Rehabilitasi	30.000.000,00	16.779.560,00	50.000.000,00	110.000.000,00	126.500.000,00	20.605.000,00	14.147.010,00	48.165.370,00	109.771.633,00		68,68	84,31	96,33	99,79	
	- Penanganan masalah - masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	100.000.000,00	51.944.500,00	30.000.000,00	18.471.215.633,00	250.000.000,00	84.285.300,00	47.111.500,00	28.951.200,00	15.863.352.212,00		84,29	90,70	96,50	85,88	
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial	-		30.000.000,00		0,00			18.140.315,00					60,47		
	- Bimbingan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (BRSDK) (Bahan Bangunan)	1.841.773.000,00	625.572.000,00	1.101.340.285,00	146.687.100,00	168.690.165,00	9.480.000,00	612.069.080,00	1.090.932.500,00	134.628.925,00		0,51	97,84	99,05	91,78	



No	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Korban Bencana	45.000.000,00	37.927.874,00		59.685.000,00	68.637.750,00	43.944.000,00	37.548.193,00		59.481.845,00		97,65	99,00		99,66	
	- Fasilitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		98.050.000,00	22.687.250,00	26.090.337,50			81.841.900,00	15.587.250,00				83,47	68,70	
	- Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum	-				0,00										
	- Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	-				0,00										
<b>9</b>	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	<b>80.278.700,00</b>	<b>36.854.455,00</b>	<b>39.720.000,00</b>	<b>43.352.680,00</b>	<b>49.855.582,00</b>	<b>75.968.700,00</b>	<b>36.474.110,00</b>	<b>38.674.060,00</b>	<b>43.125.001,00</b>	-	94,63	98,97	97,37	99,47	
	- Pelatihan Keterampilan dan Praktek Kerja Bagi Anak Terlantar	80.278.700,00	36.854.455,00	39.720.000,00	43.352.680,00	49.855.582,00	75.968.700,00	36.474.110,00	38.674.060,00	43.125.001,00		94,63	98,97	97,37	99,47	
<b>10</b>	<b>Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan eks Trauma</b>	<b>59.785.000,00</b>	<b>85.582.915,00</b>	<b>80.902.915,00</b>	-	-	<b>42.685.000,00</b>	<b>83.947.996,00</b>	<b>72.103.540,00</b>	-	-	71,40	98,09	89,12		
	- Pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	59.785.000,00	85.582.915,00	80.902.915,00		0,00	42.685.000,00	83.947.996,00	72.103.540,00			71,40	98,09	89,12		
<b>11</b>	<b>Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial</b>	<b>141.637.600,00</b>	<b>75.604.895,00</b>	<b>70.924.895,00</b>	<b>16.175.915,00</b>	<b>18.602.302,25</b>	<b>73.102.400,00</b>	<b>75.156.940,00</b>	<b>69.639.500,00</b>	<b>16.170.100,00</b>	-	51,61	99,41	98,19	99,96	
	- Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Berusaha Bagi eks Penyakit Sosial	78.772.700,00	35.925.005,00	35.925.005,00	0,00	0,00	45.968.700,00	35.627.960,00	35.923.120,00	-		58,36	99,17	99,99		
	- Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (PSK)	62.864.900,00	39.679.890,00	34.999.890,00	16.175.915,00	18.602.302,25	27.133.700,00	39.528.980,00	33.716.380,00	16.170.100,00		43,16	99,62	96,33	99,96	
<b>12</b>	<b>Pembinaan Panti Asuhan / panti Jompo</b>	<b>268.134.000,00</b>	<b>315.752.405,00</b>	<b>233.250.500,00</b>	<b>221.800.000,00</b>	<b>255.070.000,00</b>	<b>265.646.000,00</b>	<b>311.889.315,00</b>	<b>232.295.105,00</b>	<b>220.794.320,00</b>	-	99,07	98,78	99,59	99,55	
	- Pelayanan dan Pembinaan Panti Asuhan dan Jompo	-	82.501.905,00			0,00		81.973.815,00					99,36			
	- Pelayanan dan pembinaan panti Asuhan	238.960.000,00	219.779.000,00	219.779.000,00	213.800.000,00	245.870.000,00	237.518.000,00	216.444.000,00	218.825.865,00	212.794.320,00		99,40	98,48	99,57	99,53	
	- Pemberdayaan panti - panti sosial	29.174.000,00	13.471.500,00	13.471.500,00	8.000.000,00	9.200.000,00	28.128.000,00	13.471.500,00	13.469.240,00	8.000.000,00		96,41	100,00	99,98	100,00	
	- Pembinaan para lanjut usia terlanjar di luar panti	-	-					-								
<b>14</b>	<b>program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>81.304.000,00</b>	<b>96.284.300,00</b>	<b>92.478.845,00</b>	<b>35.834.455,00</b>	<b>41.209.623,25</b>	<b>80.215.200,00</b>	<b>91.421.400,00</b>	<b>87.786.691,00</b>	<b>34.718.069,00</b>	-	98,66	94,95	94,93	96,88	
	- Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemakaman	81.304.000,00	96.284.300,00	92.478.845,00	35.834.455,00	41.209.623,25	80.215.200,00	91.421.400,00	87.786.691,00	34.718.069,00		98,66	94,95	94,93	96,88	
<b>15</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial</b>	<b>380.867.000,00</b>	<b>8.038.111.725,00</b>	<b>3.815.294.149,00</b>	<b>406.115.699,00</b>	<b>467.033.053,85</b>	<b>367.858.500,00</b>	<b>7.710.452.065,00</b>	<b>3.410.957.930,00</b>	<b>399.391.890,00</b>	-	96,58	95,92	89,40	98,34	
	- Peningkatan Kapasitas kelembagaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (HIBAH)	305.867.000,00	7.969.604.025,00	3.672.422.405,00	316.586.074,00	364.073.985,10	293.560.000,00	7.641.953.456,00	3.278.441.790,00	310.250.390,00		95,98	95,89	89,27	98,00	

No	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial	75.000.000,00	68.507.700,00	73.743.000,00	22.535.000,00	25.915.250,00	74.298.500,00	68.498.609,00	73.387.800,00	22.274.900,00		99,06	99,99	99,52	98,85	
	- Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Fasilitasi Pelayanan Terpadu Bidang Sosial )	-	-	69.128.744,00	66.994.625,00	77.043.818,75		-	59.128.340,00	66.866.600,00				85,53	99,81	
<b>16</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>2.402.109.596,00</b>	<b>7.672.754.921,50</b>	<b>7.643.554.221,00</b>	<b>5.790.510.677,50</b>	<b>6.659.087.279,13</b>	<b>1.487.143.098,00</b>	<b>5.650.981.401,00</b>	<b>5.792.798.514,00</b>	<b>5.101.283.767,00</b>	-	61,91	73,65	75,79	88,10	
	- Pembinaan Keluarga	137.040.876,00	89.700.000,00	82.800.000,00	42.364.650,00	48.719.347,50	132.044.976,00	83.199.700,00	82.799.940,00	38.632.300,00		96,35	92,75	100,00	91,19	
	- Lomba Kelurga Harmonis	-	34.537.000,00	28.857.000,00	14.950.000,00	17.192.500,00		33.936.752,00	25.026.631,00	13.034.327,00			98,26	86,73	87,19	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Program KKBPK (DAK)	974.277.180,00	949.000.000,00	378.500.000,00	578.502.000,00	665.277.300,00	357.984.180,00	855.295.113,00	232.628.000,00	563.637.000,00		36,74	90,13	61,46	97,43	
	- Orientasi Kader Kelompok Ketahanan Keluarga	74.509.976,00	34.919.090,00	28.879.090,00	12.500.000,00	14.375.000,00	38.609.528,00	32.585.100,00	27.228.705,00	12.499.600,00		51,82	93,32	94,29	100,00	
	- Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Bagi PLKB dan Petugas Klinik KB	54.182.864,00	29.714.131,00	56.274.131,00	13.249.827,50	15.237.301,63	6.948.328,00	29.713.400,00	53.273.300,00	13.247.800,00		12,82	100,00	94,67	99,98	
	- Rapat Kerja Daerah	62.444.268,00				0,00	5.559.404,00					8,90				
	- Orientasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bagi Pengelolaan Program KKB Tingkat Kecamatan dan Desa	65.044.432,00	28.880.000,00	24.000.000,00	13.580.500,00	15.617.575,00	42.609.182,00	28.479.800,00	24.000.000,00	13.280.500,00		65,51	98,61	100,00	97,79	
	- Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	118.950.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	55.475.000,00	63.796.250,00	112.705.000,00	119.670.000,00	118.845.000,00	55.318.950,00		94,75	99,73	99,04	99,72	
	- Biaya Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di Kecamatan	915.660.000,00	4.181.874.700,00			0,00	790.682.500,00	2.932.768.436,00				86,35	70,13			
	- Pembentukan Kampung KB	-	76.405.000,00			0,00		76.065.450,00					99,56			
	- Biaya Operasional Pergerakan di kampung KB	-		72.217.000,00	28.871.700,00	33.202.455,00			67.603.700,00	19.606.600,00				93,61	67,91	
	- Biaya Operasional Pergerakan di kampung KB	-		2.313.924.600,00	1.055.496.000,00	1.213.820.400,00			1.609.383.200,00	939.770.000,00				69,55	89,04	
	- Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	-	71.320.000,00	71.320.000,00	77.932.000,00	89.621.800,00		71.320.000,00	63.730.000,00	71.972.000,00			100,00	89,36	92,35	
	- Fasilitasi Pembentukan Kelompok Ketahanan Keluarga Desa Stunting	-		200.000.000,00	90.050.000,00	103.557.500,00			196.669.605,00	88.012.040,00				98,33	97,74	
	- Integrasi Program KKBPK dengan Pembangunan sektor lainnya di Kampung KB	-	37.752.200,50			0,00		34.215.250,00					90,63			
	- Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan (DAK)	-		2.064.633.400,00	2.192.789.000,00	2.521.707.350,00			1.468.566.433,00	1.874.222.750,00				71,13	85,47	
	- Biaya Operasional Pergerakan Di Desa Stunting (DAK)	-	2.018.652.800,00	255.749.000,00		0,00		1.353.732.400,00	253.444.000,00				67,06	99,10		
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Invertensi Stunting (DAK)	-		60.000.000,00	42.750.000,00	49.162.500,00			0,00	42.049.900,00				-	98,36	

No	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Dukungan Operasional Pembinaan Program KKBPB Bagi Masyarakat oleh Kader Pembantu Pembina KB Desa (DAK)	-		1.886.400.000,00	1.572.000.000,00	1.807.800.000,00			1.569.600.000,00	1.356.000.000,00				83,21	86,26	
17	<b>Program Kependudukan</b>	-	<b>24.417.586,50</b>	<b>32.690.103,00</b>	<b>45.875.000,00</b>	<b>52.756.250,00</b>	-	<b>24.417.150,00</b>	<b>28.902.215,00</b>	<b>45.873.640,00</b>	-		100,00	88,41	100,00	
	- Evaluasi Data Kependudukan dan KB	-	24.417.586,50	32.690.103,00	45.875.000,00	52.756.250,00		24.417.150,00	28.902.215,00	45.873.640,00			100,00	88,41	100,00	
18	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>156.282.984,00</b>	<b>82.725.141,00</b>	<b>73.125.141,50</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>12.477.500,00</b>	<b>112.863.552,00</b>	<b>80.848.382,00</b>	<b>68.102.855,00</b>	<b>10.648.900,00</b>	-	72,22	97,73	93,13	98,15	
	- Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	79.624.592,00	25.988.576,00	21.868.576,00	10.850.000,00	12.477.500,00	36.205.500,00	25.088.100,00	21.868.180,00	10.648.900,00		45,47	96,54	100,00	98,15	
	- Pelatihan Tenaga Pendidik Sebaya PIK-R Tahap tumbuh	76.658.392,00	34.546.000,00	33.866.000,50		0,00	76.658.052,00	34.539.952,00	28.844.380,00			100,00	99,98	85,17		
	- Pengadaan Genre KIT	-				0,00										
	- Advokasi dan KIE Produk Hukum bagi kebijakan dan program Tribina	-	22.190.565,00	17.390.565,00		0,00		21.220.330,00	17.390.295,00				95,63	100,00		
19	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>	<b>93.113.856,00</b>	<b>73.040.000,00</b>	<b>80.905.200,00</b>	<b>45.477.600,00</b>	<b>52.299.240,00</b>	<b>62.743.858,00</b>	<b>447.279.500,00</b>	<b>72.554.400,00</b>	<b>42.672.600,00</b>	-	67,38	612,38	89,68	93,83	
	- Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	93.113.856,00	73.040.000,00	80.905.200,00	45.477.600,00	52.299.240,00	62.743.858,00	447.279.500,00	72.554.400,00	42.672.600,00		67,38	612,38	89,68	93,83	
20	<b>Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b>	-	-	-	-	-		-	-	-	-					
	- Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di kecamatan	-				0,00										
21	<b>Program Keluarga Sejahtera</b>	-	-	-	<b>981.099.000,00</b>	<b>1.128.263.850,00</b>	-	-	-	<b>971.214.000,00</b>	-				98,99	
	- Pembinaan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (DAK)	-			981.099.000,00	1.128.263.850,00				971.214.000,00					98,99	
22	<b>Program Kesorasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>95.153.300,00</b>	<b>59.106.862,00</b>	<b>42.690.122,00</b>	<b>47.334.438,00</b>	<b>54.434.603,70</b>	<b>13.546.250,00</b>	<b>57.740.600,00</b>	<b>34.958.122,00</b>	<b>47.203.995,00</b>	-	14,24	97,69	81,89	99,72	
	- Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38.741.800,00	31.349.850,00			0,00	4.899.250,00	31.149.800,00				12,65	99,36			
	- Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Melalui Pengembangan Kota Layak Anak	56.411.500,00	27.757.012,00	42.690.122,00	47.334.438,00	54.434.603,70	8.647.000,00	26.590.800,00	34.958.122,00	47.203.995,00		15,33	95,80	81,89	99,72	
23	<b>Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender &amp; Anak</b>	<b>300.309.500,00</b>	<b>616.396.650,00</b>	<b>724.503.425,00</b>	<b>485.711.382,00</b>	<b>558.568.089,30</b>	<b>256.283.600,00</b>	<b>608.212.179,00</b>	<b>666.869.121,00</b>	<b>439.592.067,00</b>	-	85,34	98,67	92,04	90,50	
	- Advokasi dan Fasilitas Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Perempuan	58.900.000,00	39.174.500,00	79.807.150,00	48.390.000,00	55.648.500,00	54.200.000,00	38.929.300,00	78.989.920,00	47.888.750,00		92,02	99,37	98,98	98,96	

No	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Fasilitas Pengembangan P2TP2A	41.265.000,00	42.354.000,00			0,00	25.129.000,00	42.354.000,00				60,90	100,00			
	- Pengelolaan Penanganan Korban Perempuan dan Anak	-			200.000,00	230.000,00				200.000,00					100,00	
	- Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	56.375.000,00	55.068.375,00	54.766.761,00		0,00	56.375.000,00	54.818.315,00	53.966.761,00			100,00	99,55	98,54		
	- Pengembangan sistem Informasi Gender dan Anak	-	24.257.875,00	24.257.875,00	21.199.000,00	24.378.850,00		23.307.000,00	24.218.112,00	21.199.000,00			96,08	99,84	100,00	
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	72.324.000,00	74.250.000,00	51.254.365,00	58.942.519,75		72.150.000,00	73.840.800,00	50.448.400,00			99,76	99,45	98,43	
	- Sosialisasi Tentang Peningkatan Pemahaman Keluarga Melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUD)	-	30.978.000,00	30.978.000,00		0,00		30.577.600,00	30.729.160,00				98,71			
	- Fasilitas Pembentukan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah	89.820.000,00				0,00	66.830.000,00					74,40				
	- Fasilitas Operasional Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah	-	242.250.000,00	307.553.700,00	263.562.400,00	303.096.760,00		241.866.284,00	263.322.600,00	219.060.600,00			99,84	85,62	83,12	
	- Fasilitas Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN)	53.949.500,00	45.531.000,00	45.930.439,00	38.921.510,00	44.759.736,50	53.749.600,00	45.530.880,00	45.829.010,00	38.720.045,00		99,63	100,00	99,78	99,48	
	- Fasilitas Forum Anak Daerah	-		30.000.000,00	14.639.107,00	16.834.973,05			23.343.963,00	14.531.272,00				77,81	99,26	
	- Sosialisasi Pembentukan Karakter Anak Sejak Dini	-				0,00										
	- Sosialisasi Peningkatan Pelaksanaan Tumbuh Kembang Anak Terhadap Orang Tua	-	31.761.000,00			0,00		31.761.000,00					100,00			
	- Fasilitas Penyelenggara Hari Ibu	-		26.959.500,00	201.000,00	231.150,00			26.959.500,00	200.000,00				100,00	99,50	
	- Fasilitas Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	-	32.697.900,00	50.000.000,00	47.344.000,00	54.445.600,00		26.917.800,00	45.669.295,00	47.344.000,00			82,32	91,34	100,00	
<b>24</b>	<b>Penguatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	- Fasilitas upaya perlindungan anak terhadap tindak kekerasan	-				0,00										
<b>25</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>344.824.920,00</b>	<b>246.699.325,00</b>	<b>326.616.825,00</b>	<b>150.811.700,00</b>	<b>173.433.455,00</b>	<b>280.100.320,00</b>	<b>243.008.750,00</b>	<b>323.953.103,00</b>	<b>148.182.050,00</b>	-	81,23	98,50	99,18	98,26	
	- Sosialisasi Sistem Pencatatan dan pelaporan KDRT, Pelecehan Seksual Triffling terhadap Perempuan dan Anak serta Perempuan Kepala Keluarga	53.926.920,00	49.960.000,00	86.526.000,00	41.795.000,00	48.064.250,00	51.676.920,00	49.650.000,00	86.525.800,00	40.342.000,00		95,83	99,38	100,00	96,52	
	- Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	67.368.000,00	44.260.000,00	99.483.500,00	45.219.000,00	52.001.850,00	66.190.000,00	43.261.000,00	97.392.563,00	45.219.000,00		98,25	97,74	97,90	100,00	

No	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bidang pemberdayaan perempuan	144.530.000,00		100.000.000,00	14.950.000,00	17.192.500,00	105.580.000,00		99.485.000,00	14.950.000,00		73,05		99,49	100,00	
	- Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Melalui Gerakan Sayang Ibu (GSI)	79.000.000,00	40.607.325,00	40.607.325,00	18.847.700,00	21.674.855,00	56.653.400,00	39.777.750,00	40.549.740,00	18.171.050,00		71,71	97,96	99,86	96,41	
	- Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	-				0,00										
	- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	-	111.872.000,00		30.000.000,00	34.500.000,00		110.320.000,00		29.500.000,00			98,61		98,33	
<b>26</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta &amp; Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	<b>1.950.000.000,00</b>	<b>37.726.750,00</b>	<b>113.726.750,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>41.400.000,00</b>	<b>1.697.499.207,00</b>	<b>37.326.500,00</b>	<b>108.795.525,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	-	87,05	98,94	95,66	100,00	
	- Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	-	37.726.750,00	113.726.750,00	36.000.000,00	41.400.000,00		37.326.500,00	108.795.525,00	36.000.000,00			98,94	95,66	100,00	
	- Penunjang Kegiatan PKK dan Organisasi Kewanitaan	1.950.000.000,00	-			0,00	1.697.499.207,00	-				87,05				
	- Advokasi dan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pendidikan Politik Perempuan	-				0,00										
	- Advokasi dan Pendidikan Perempuan dalam Politik dan Perencanaan Kebijakan di Desa	-				0,00										
<b>27</b>	<b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan</b>	-	-	<b>50.000.000,00</b>	-	-	-	-	<b>49.999.715,00</b>	-	-			<b>100,00</b>		
	- Kegiatan Penyuluhan bagi Perempuan dalam Penguatan Ekonomi Rumah Tangga Perdesaan	-		50.000.000,00		0,00			49.999.715,00					100,00		
<b>28</b>	<b>Program Pembinaan Keagamaan, Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-					
	- Fasilitasi Sarana dan prasarana Tempat Ibadah	-				0,00										
	- Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Bahaya Narkotika dan HIV/AIDS	-				0,00										

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan. Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT ) identifikasi faktor internal dan Eksternal sebagai berikut :

Lingkungan Internal meliputi :

### 1. Kekuatan ( Strength )

- Dukungan Sumber-sumber pembiayaan baik APBD maupun APBN
- Heterogenitas budaya masyarakat yang didukung dengan suasana yang kondusif
- Tersedianya jumlah sumberdaya manusia yang memadai serta pengalaman dalam penanganan permasalahan perempuan, anak dan Keluarga Berencana.

### 2. Kelemahan (Weakness)

- Kondisi geografis yang cukup luas sehingga belum maksimal untuk dikembangkan.
- Jumlah kemiskinan yang masih sangat tinggi.
- Belum tertatanya manajemen perencanaan serta terbatasnya sumber pendanaan yang berbasis kinerja dalam pengentasan kemiskinan, responsif gender serta pengendalian penduduk.

Lingkungan eksternal meliputi :

### 1. Peluang (Opportunities)

- Meningkatnya Partisipasi sosial masyarakat.
- Meningkatnya fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
- Kebijakan pembangunan daerah yang berbasis kewilayahan guna mempercepat pembangunan kecamatan dan mengurangi tingkat kemiskinan.
- Terbukanya kesempatan keikutsertaan perempuan didalam pelaksanaan pembangunan serta semakin besarnya akan pentingnya perlindungan terhadap anak dan Keluarga Berencana.
- Dukungan dalam bentuk program & kegiatan Jamkesmas, Jamkesda, Beasiswa Miskin, Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) serta Program Keluarga Berencana (KB).

### 2. Ancaman / Tantangan (Threats)

- Lemahnya koordinasi antar sektor.
- Meningkatnya tuntutan masyarakat akan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparansi dan akuntabel.
- Masih adanya daerah yang menjadi kantong kemiskinan.
- Faktor – faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain faktor internal ( ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari – hari, ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah masalah sosial yang dihadapinya ) dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin; terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya system ekonomi kerakyatan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis).

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Permasalahan dan akar masalah yang dihadapi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tergambar dan dapat dilihat pada Tabel T-B. 35 dibawah ini:

**Tabel T-B.35**

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih rendahnya kesejahteraan Sosial	Belum optimalnya keberdayaan sosial	Rendahnya pendapatan PPKS
			Belum optimalnya kapasitas SDM kelompok rentan
		Belum optimalnya kualitas pelayanan sosial	Cakupan pelayanan PPKS masih rendah
			Kualitas pekerja sosial belum optimal
2	Rendahnya keberdayaan perempuan dan anak	Masih rendahnya kualitas perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi dan politik	Rendahnya kapasitas SDM perempuan
			Belum optimalnya kesempatan perempuan
			Belum optimalnya pengarusutamaan gender
			Rendahnya akses perempuan dalam politik
		Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya kerja sama antar lembaga (LSM)
			Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media
3	Belum optimalnya kualitas kesehatan reproduksi	Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan Keluarga Berencan (KB)	Belum optimalnya pemerataan layanan untuk mendukung program "Bangga Kencana"
			Belum optimalnya partisipasi Sekolah Siaga Kependudukan
			Belum optimalnya partisipasi Kelompok Ketahanan Keluarga
			Belum optimalnya fungsi Kampung KB

### 3.1.1 Permasalahan Urusan Sosial

Urusan Sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan sosial dijalankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu warga negara dan menjamin akses masyarakat untuk mendapat pelayanan sosial. Pemerintah Kabupaten Ketapang telah berusaha maksimal dalam memberikan layanan sosial walaupun demikian, capaian pembangunan sosial di Kabupaten Ketapang masih dihadapkan pada permasalahan pokok masih rendahnya keberdayaan sosial. Banyaknya fakir miskin sementara bantuan ekonomi produktif terbatas.

Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Ketapang sebagai akibat dari dinamika pertumbuhan wilayah yaitu timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berakar dari berbagai aspek pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah merupakan dua aspek yang berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Kabupaten Ketapang, pada dasarnya permasalahan dari tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial diakibatkan karena belum terpadunya penanganan PMKS oleh OPD-OPD yang terkait dengan persoalan kesejahteraan sosial.

Permasalahan Kesejahteraan Sosial Secara Geografis Kabupaten Ketapang ini merupakan wilayah aman dari bencana namun rentan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial. Populasi PMKS yang terdata oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang tahun 2017 mencapai 194.234 PMKS atau 40,99 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan. yang tercakup di dalam 22 jenis PMKS .

a. Keluarga Fakir Miskin

Secara umum angka kemiskinan di kabupaten Ketapang relative tinggi terutama di kecamatan-kecamatan yang dekat dari ibu kota kabupaten. Berdasarkan data SIKS-NG yang telah dimutakhirkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos bahwa jumlah keluarga fakir miskin pada tahun 2019 adalah sebesar 151.856 Jiwa,

b. Orang dengan Kecacatan/Disabilitas

Jumlah orang dengan kecacatan/disabilitas di Kabupaten Ketapang menunjukkan angka yang signifikan. Estimasi jumlah orang dengan kecacatan di Kabupaten Ketapang sekitar 1.787 orang. Sementara capaian target tahun 2019 baru mencapai 60 orang dari target seharusnya 550

c. Perempuan dan Anak ( Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga) Jumlah Kejadian KTK (Korban Tindak Kekerasan ) yang dilaporkan di Kabupaten Ketapang mengalami penurunan dari tahun 2019 berjumlah 143 KTK menjadi 66 KTK pada tahun 2019. Jumlah ini perlu diwaspadai mengingat korban KDRT cenderung tidak melaporkan kejadian kepada pihak berwajib. Hal ini disebabkan masih adanya nilai menjaga kerahasiaan rumah tangga. Karenanya perlu upaya rehabilitasi yang dapat menjangkau para korban KDRT yang sesungguhnya.

d. Bencana Alam

Bencana Banjir adalah kasus yang sering terjadi setiap tahun di Kabupaten Ketapang, terutama di daerah yang dulunya menjadi pusat ilegal logging sehingga daerah yang menjadi pusat perburuan penebangan hutan tersebut tergolong wilayah rawan bencana banjir.



Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terutama dalam pemanfaatan lahan untuk pertanian serta alih fungsi lahan (dari hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan serta bertambahnya lahan kritis di Kabupaten Ketapang. Tingginya alih fungsi dari pertanian menjadi pemukiman juga menyebabkan terganggunya system jaringan irigasi dan drainase.

Dampak perubahan guna lahan yang terjadi di Kabupaten Ketapang adalah timbulnya genangan dan kejadian banjir di beberapa titik terutama wilayah pemukiman seperti banjir di Kecamatan Sandai, Nanga Tayap, Marau, Tumbang Titi, Jelai Hulu dan Hulu Sungai dan Sungai Laur. Di beberapa tempat genangan air terutama daerah perkotaan di Kabupaten Ketapang, kondisi lingkungan yang kurang baik di daerah hulu, terutama terkait fungsi resapan air, menyebabkan sedimentasi dan banjir di daerah hilir. Hal tersebut diperparah dengan makin tingginya tingkat alih fungsi lahan menjadi permukiman serta perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan (terutama terkait dengan pengelolaan sampah).

e. Korban Bencana

Korban Bencana termasuk didalamnya korban bencana alam, non alam dan sosial menyebabkan keluarga yang memiliki masalah psikososial semakin besar, disamping KTK dan Pekerja migran.

f. Permasalahan Anak

Permasalahan anak terbagi dalam cluster anak terlantar, anak jalan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dengan

32 kecacatan/disabilitas. Jumlah permasalahan anak yang terdata oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Ketapang pada tahun 2017 sebanyak 2.165 anak. Capaian target untuk mengatasi masalah anak sampai dengan tahun 2018 baru mencapai 188 anak. Permasalahan anak bukan hanya anak saja tetapi juga berkaitan dengan pola asuh keluarga. Untuk itu program anak juga perlu di sentuh tentang penguatan keluarganya.

g. Lanjut Usia

Data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Ketapang menunjukkan bahwa lanjut usia di Kabupaten Ketapang berjumlah 1905 orang. Capaian target penanganan sampai tahun 2019 atau kewajiban Negara untuk membantu lanjut usia tidak tercapai hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.

h. Penyandang Penyakit Sosial

Penyandang penyakit social terdiri dari Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahatan, Korban Penanggulangan Narkoba (NAPZA) dan HIV/AIDS. Jumlah yang terdata secara keseluruhan mencapai 286 Orang. Penyandang Masalah tersebut memerlukan penanganan rehabilitasi social, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya di masyarakat. Namun demikian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2019 belum dapat melakukan upaya pembinaan dan rehabilitasi.

### **3.1.2 Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengarusutamaan gender melalui peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 merupakan strategi yang dilakukan secara nasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan.

Penerapan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak terdiri dari :

- Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan melalui kegiatan pembinaan dan evaluasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi, lomba pengelola bina keluarga balita dan pelatihan Pokja BKB Tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan.
- Kebijakan dan pelayanan publik, program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua penduduk perempuan dan laki-laki.
- Pengarusutamaan gender merupakan upaya menegakkan hak-hak perempuan, memberikan kesempatan yang sama, pengakuan dan penghargaan yang sama di masyarakat.
- Pengarusutamaan gender mengantarkan kepada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
- Keberhasilan pengarusutamaan gender memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa.

Dalam upaya mencapai tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat telah dilakukan berbagai upaya pembangunan yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui penurunan angka kematian ibu saat hamil, melahirkan dan masa nifas (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Sejak tahun 1996 telah diluncurkan suatu gerakan yaitu Gerakan Sayang Ibu (GSI) dimana merupakan gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan utamanya dalam percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Kematian Anak. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan beberapa program yaitu antara lain :

- Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
- Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
- Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Secara ringkas isu – isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah :

- 1 Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS );
- 2 Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam persoalan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- 3 Belum terlaksananya inisiasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB tentang pengelolaan sumber dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mengatasi persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- 4 Keterbatasannya aparatur teknis bidang sosial;
- 5 Masih rendahnya penguatan dan pembinaan stakeholders (SKPD, lembaga masyarakat, dan badan internasional) dalam rangka advokasi dan sosialisasi PUG (Pengarusutamaan gender), PKHP (Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan), KPA (Kesejahteraan dan Perlindungan Anak), KS (Keluarga Sejahtera) dan KB (Keluarga Berencana), masih sangat rendah;

- 6 Kurangnya kompetensi teknis tenaga-tenaga fasilitator dalam rangka penyebarluasan pengetahuan dan ketrampilan penganggaran responsive gender (gender budgeting), PKHP, KPA, KB dan KS;
- 7 Perempuan kurang memiliki kesempatan dan peran dalam pengambilan keputusan, sehingga manfaat yang diperoleh perempuan belum bias disetarakan dengan kaum laki-laki, yang mengakibatkan fenomena kesenjangan gender.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

visi yang akan dicapai oleh Kabupaten Ketapang pada periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

***“Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”***

Rumusan visi tersebut secara konseptual menjadi basis penyusunan misi daerah. Visi jangka menengah memuat gagasan pokok yang merangkai perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun. Oleh karena itu rumusan visi harus dijabarkan dengan jelas sehingga dapat dioperasionalkan dalam bentuk misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi indikasi bagi perumusan program pembangunan. Rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Ketapang 2021-2026**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera	Ketapang	Arti Ketapang dalam visi ini merujuk pada semua aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Ketapang yang tercermin di dalam berbagai rumpun urusan, seperti ekonomi, sumber daya manusia, sosial, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan sebagai pendukungnya.
	Maju	Sebuah kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Cita-cita ini merupakan sebuah harapan untuk mewujudkan Kabupaten Ketapang yang lebih baik. Sebuah daerah yang maju dapat ditunjukkan dengan tingginya kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.  Maju juga dapat dikaitkan dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di sektor non-tambang. Kondisi ini ditandai dengan semakin tingginya kontribusi sektor non-tambang terhadap perekonomian.
	Masyarakat	Masyarakat yang tinggal/ berdomisili di Kabupaten Ketapang dan berkontribusi positif bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Ketapang.
	Sejahtera	Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ditandai dengan ketercukupan sandang, pangan dan papan. Indikator kesejahteraan pada umumnya dinilai dengan tingkat kemiskinan dan indeks gini untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan/ kesejahteraan.  Kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan memastikan beberapa poin yang terdapat di dalam definisi maju dapat berkembang dengan baik.

Visi RPJMD Kabupaten Ketapang disusun dengan memperhatikan telaah isu strategis, Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMN.

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas maka telah ditetapkan **Misi** sebagai berikut :

- 1 Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik.
- 2 Melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur.
- 3 Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing.
- 4 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan.
- 5 Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat.
- 6 Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Ketapang.

Dari ke 6 (Enam) misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 yang menjadi misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas sebagai berikut :

***“Pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki Daya Saing”***

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang. Isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang**  
**Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan WK.KDH Terpilih	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Pemberdayaan Sosial	- Terbatasnya jumlah layanan terhadap KFM	- tingginya jumlah keluarga fakir miskin - Sumber dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang belum teralisasi dengan kebijakan daerah	- Adanya dukungan dari pemerintah kecamatan dandesa - Adanya duniausaha / Perusahaan

2	Program Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya layanan homecare dan Foster care bagi LU</li> <li>- Terbatasnya pelayanan tromatik bagi masyarakat yang mengalami guncangan</li> <li>- Tidak adanya rumah singgah</li> <li>- Tingginya jumlah keterlantaran anak</li> <li>- Belum adanya rumah perlindungan anak</li> <li>- Belum adanya aksesibilitas bagi anak disabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tersedianya pekerja sosial profesional</li> <li>- Terbatas nya SDM yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya PSKS</li> <li>- Adanya regulasi tentang pekerja sosial profesional</li> <li>- Tersedianya PSKS</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan terhadap ODK lebih terfokus pada perkotaan</li> <li>- Belum tersedianya aksesibilitas bagi ODK pada tempat-tempat pelayanan umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sifat tertutup keluarga Odk di daerah pedesaan</li> <li>- Belum tersedianya RBM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan dana</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya standarisasi pelayanan dalam panti</li> <li>- Jumlah panti yang cukup besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya pemahaman secara makro dari pengurus maupun pengelola panti</li> <li>- Keterbatasan SDM yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS dalam panti</li> </ul>
3	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak adanya dana insentif bagi PSKS</li> <li>- Keterbatasan dana dalam mengoptimalkan kegiatan pembinaan Karang Taruna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya regulasi yang memungkinkan untuk diberikandana insentif</li> <li>- Karang Taruna tidak aktif semua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jiwa relawan/sosial dari PSKS</li> </ul>

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional terutama di bidang sosial, untuk itu sasaran strategis Kementerian Sosial seperti tertuang dalam Renstra Tahun 2015-2019 adalah :

- a. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) % pada tahun 2019, melalui indicator :
  - Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar.
  - Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marginal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas.
- b. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui indicator :
  - Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya.
  - Persentase (%) Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

### 3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalbar

Selaras dengan sasaran strategis Kementerian Sosial, maka sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Renstra Tahun 2019-2023 adalah :

- a. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pelayanan bagi PMKS dan masyarakat, dengan indicator :
  - Jumlah PMKS dan Masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan dan pelayanan.
- b. Meningkatkan Pemantauan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap LKS dan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial lainnya, dengan indicator :
  - Jumlah LKS dan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial lainnya yang mendapatkan pemantauan, pengendalian dan pembinaan.

### 3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 .

Dalam Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2018 sebagaimana yang tertuang didalam Keputusan Kepala Badan BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat Nomor 47 Tahun 2013 bahwa Visi yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan adalah “ **Mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sehat, cerdas dan sejahtera melalui terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta optimalisasi Program Keluarga Berencana** ”.

Adapun Misi terdiri dari :

1. Meningkatkan Tertib Administrasi Dan Keuangan Serta Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kantor, Meningkatkan Perencanaan Yang Baik Dan Terukur Serta Meningkatkan Profesionalisme Aparatur.
2. Meningkatkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender Serta Meningkatkan Partisipasi Aktif Perempuan dalam Pembangunan.
3. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Hak-Hak dan Pemenuhan Kebutuhan Perempuan.
4. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Hak-Hak dan Pemenuhan Kebutuhan Anak Serta Optimalisasi Program Keluarga Berencana.

Berdasarkan Perpres RI tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024 tentang penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, merupakan pedoman bagi Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD. Untuk sasaran, indikator dan Target Keluarga Berencana masuk dalam salah satu 7 agenda pembangunan yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sasaran, Indikator dan Target Nasional dari Program Keluarga Berencana yaitu :

1. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Penduduk.
  - Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,1 Tahun 2024
2. Terpenuhinya Layanan Dasar
  - Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalensi Rate (mCPR) 63,4 % Tahun 2024
  - Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmed Need) 7,4% Tahun 2024
  - Angka Kelahiran Remaja 15-19 Tahun (ASFR 15-19) 18 Tahun 2024
  - Prevalensi Stunting Pada Balita (Pendek dan Sangat Pendek) 14% Tahun 2024

Jika dilihat dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan, yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana dengan Sasaran, Indikator dan Target sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total
  - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) 2,1 Rata-Rata Anak/Wanita Tahun 2024
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern
  - Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalensi Rate (mCPR) 63,41 % Tahun 2024
3. Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi
  - Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) 7,4% Tahun 2024
4. Menurunnya Angka Kelahiran Remaja
  - Angka Kelahiran Remaja 15-19 Tahun (ASFR 15-19) 18 Kelahiran/1000 WUS 15-19 TH Tahun 2024
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga
  - Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) 61 Tahun 2024

Jika dilihat dari visi dan misi baik Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat dan Visi misi dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Prop. Kalbar serta RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan BKKBN terdapat kesesuaian dari visi, misi, sasaran, indikator dan target yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2021.

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Skenario pembangunan wilayah diperlukan untuk memberikan acuan bagi penataan ruang, pemerataan pembangunan antar desa dan antar kecamatan, pertumbuhan seimbang antara pusat pemerintah dan wilayah terpencil dan percepatan kemajuan daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil serta memperpendek rentang kendali (*spend of control*) melalui pemekaran wilayah kabupaten dan kecamatan.

Kabupaten Ketapang merupakan wilayah dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, distribusi penduduk yang terpusat di ibukota kabupaten dan perkembangan pembangunan antar kecamatan yang belum merata oleh sebab itu pengembangan kawasan pedesaan dan pulau-pulau kecil memiliki nilai strategis baik dari segi ekonomi, politik maupun budaya. Pengembangan kawasan pedesaan diarahkan untuk mempercepat kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keterkaitan antar wilayah melalui pengembangan ekonomi lokal, perbaikan sarana prasarana dasar, kesehatan, air bersih dan sanitasi, litrik serta penyediaan sarana dan prasaran transportasi untuk menghubungkan kawasan pedesaan dan pulau-pulau terpencil dengan pusat pemerintahan maupun pusat-pusat ekonomi.

Secara rinci terdapat berbagai kawasan khusus yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Ketapang antara lain kawasan lindung yang terdiri dari hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan resapan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan sempadan sungai, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi sedangkan penentuan kawasan yang terkait dengan kegiatan perekonomian antara lain kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan kawasan peruntukan lainnya. Pengaturan kawasan tersebut masuk didalam kawasan strategis yang ada di Kabupaten Ketapang yaitu Kawasan Strategis Propinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dengan demikian, secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Ketapang. Namun demikian, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang tetap memberikan dukungan penuh untuk terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah dan terjaganya lingkungan hidup yang baik di Kabupaten Ketapang, khususnya yang berkaitan dengan tupoksi dan wewenang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **Urusan Bidang Sosial**

Masalah Pokok :

- Masih rendahnya kesejahteraan Sosial

Masalah :

- Kualitas pekerja sosial belum optimal

Akar Masalah :

- Rendahnya pendapatan PPKS
- Belum optimalnya kapasitas SDM kelompok rentan
- Cakupan pelayanan PPKS masih rendah
- Kualitas pekerja sosial belum optimal

#### **Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Masalah Pokok :

- Rendahnya keberdayaan perempuan dan anak

Masalah :

- Masih rendahnya kualitas perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi dan politik
- Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Akar Masalah :

- Rendahnya kapasitas SDM perempuan
- Belum optimalnya kesempatan perempuan
- Belum optimalnya pengarusutamaan gender
- Rendahnya akses perempuan dalam politik
- Belum optimalnya kerja sama antar lembaga (LSM)
- Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media

#### **Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Masalah Pokok :

- Belum optimalnya kualitas kesehatan reproduksi

Masalah :

- Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Akar Masalah :

- Belum optimalnya pemerataan layanan untuk mendukung program “Bangga Kencana”
- Belum optimalnya partisipasi Sekolah Siaga Kependudukan
- Belum optimalnya partisipasi Kelompok Ketahanan Keluarga
- Belum optimalnya fungsi Kampung KB



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun, yang menggambarkan arah strategi Perangkat Daerah. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan *outcomes* dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Penjelasan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstranya.

Sasaran ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan unit kerja dilingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait, adapun sasaran-sasaran yang akan dicapai sebagai berikut **(Tabel 4.1).**

**Tabel 4.1.**  
**TC-25 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2021-2026**

No	Tujuan	SASARAN	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10,64	8,87	7,09	5,32	3,55
2	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,01	71,56	72,67	73,46	74,02
3	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Penduduk	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,21	2,19	2,10	2,10	2,29

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Strategi merupakan cara yang digunakan atau yang akan diterapkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang guna mencapai visi yang telah ditentukan serta disesuaikan dengan masing-masing misi. Adapun strategi dan arah kebijakan yang diterapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

**TABEL TC-26 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021-2026**

<b>Visi: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera</b>			
<b>Misi: Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Daya Saing</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Meningkatnya kesejahteraan sosial</b>	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Peningkatan keberdayaan sosial	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Terhadap PPKS
			Peningkatan Pendapatan PPKS
			Peningkatan kualitas pekerja sosial
			Peningkatan Kapasitas SDM Kelompok Rentan
		Optimalisasi Upaya Peanggunan Resiko Kelompok Rentan	Optimalisasi Jaminan Sosial Kelompok Rentan
			Penanganan potensi dampak sosial akibat bencana
			Pengembangan masyarakat tanggap bencana
		Peningkatan kualitas pelayanan sosial	Peningkatan cakupan pelayanan PPKS
			Optimalisasi pengelolaan taman makam pahlawan
<b>Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak</b>	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan kualitas perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi dan politik	Peningkatan kapasitas SDM perempuan
			Peningkatan kesempatan perempuan
			Peningkatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Peningkatan akses perempuan dalam politik
		Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan pengarusutamaan gender
			Peningkatan kerja sama antar lembaga (LSM)
			Peningkatan Taraf Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan Upaya pemenuhan hak anak	Pengembangan Kota Layak Anak
<b>Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Penduduk</b>	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan Keluarga Berencana (KB)
			Optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan keluarga
			Peningkatan partisipasi Kelompok Ketahanan Keluarga

# **BAB VI**

## **RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1 RENCANA PROGRAM TAHUN 2021-2026**

Penyusunan program pembangunan akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang, dengan 14 (empat belas) Program Prioritas untuk Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
8. Program Perlindungan Perempuan
9. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
11. Program Perlindungan Khusus Anak
12. Program Pengendalian Penduduk
13. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
14. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

### **6.2 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2021-2026**

Rencana kegiatan pembangunan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Ketapang untuk kurun waktu tahun 2021-2026 secara rinci masing-masing program sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:**

##### **A. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **B. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

- C. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan:
  1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- D. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan:
  1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- E. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan:
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- F. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan:
  1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Pengadaan Mebel
  4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- G. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan:
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- H. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan:
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

### A. Kegiatan: Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Sub Kegiatan:

#### 6. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT

### B. Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

#### 1. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT

#### 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

#### 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

#### 4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

#### 5. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

#### 6. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

## 3 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

### A. Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan:

#### 1. Penyediaan Permakanan

#### 2. Penyediaan Sandang

#### 3. Penyediaan Alat Bantu

#### 4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

#### 5. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

#### 6. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

### B. Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan:

#### 1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

#### 2. Penyediaan Permakanan

#### 3. Penyediaan Sandang

#### 4. Penyediaan Alat Bantu

#### 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

#### 6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

#### 7. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

**4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

A. Kegiatan: Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Sub Kegiatan:

1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
2. Rujukan Anak-Anak Terlantar
3. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

B. Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

**5 PROGRAM PENANGANAN BENCANA**

A. Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Makanan
2. Penyediaan Sandang
3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
4. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
5. Pelayanan Dukungan Psikososial

B. Kegiatan: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan TarunaSiaga Bencana

**6 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Kegiatan: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

**7 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

A. Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

B. Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

**8 PROGRAM: PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

- A. Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan:
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- B. Kegiatan: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan:
1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- C. Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan:
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
  2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

**9 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

- A. Kegiatan: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan:
1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
  2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

**10 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

- A. Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan:
1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- B. Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan:
1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



## 11 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- A. Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- B. Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## 12 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

- A. Kegiatan: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan:

1. Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
2. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
3. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal

- B. Kegiatan: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor lain
2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
3. Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
4. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
5. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
6. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
7. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

## 13 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

- A. Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan:

1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
3. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK.
4. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
5. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK.

6. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
  7. Pengendalian Program KKBPK.
- B. Kegiatan: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan:
1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  3. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
- C. Kegiatan: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- Sub Kegiatan:
1. Pembinaan Terpadu Kampung KB

#### 14 **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**

- A. Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Sub Kegiatan:
1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
  2. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  3. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  4. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
  5. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  6. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  7. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
  8. Advokasi dan Promosi IPK
- B. Kegiatan: Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Sub Kegiatan:

1. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Secara rinci tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat disimak pada lampiran Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T-C.27 dibawah ini :

**TABEL T-C 27**  
**RENCANA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KETAPANG**  
**( Matriks Renstra )**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				15.424.230.456,00		16.934.104.496,20		18.345.673.492,39		20.172.248.523,52		22.665.689.891,91			Sekretariat	
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standard	100	100	11.039.284.910,00	100	11.805.930.820,20	100	12.368.342.646,89	100	13.058.894.385,68	100	13.798.736.858,60	100	13.798.736.858,60		
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Dok	11 Dokumen	502.102.982,00	11 Dok	552.313.280,20	11 Dok	607.544.608,22	11 Dokumen	668.299.069,04		735.128.975,95	55 Dok	735.128.975,95	Sekretariat	
		1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dokumen	255.934.452,00	4 Dok	281.527.897,20	4 Dok	309.680.686,92	4 Dokumen	340.648.755,61	4 Dok	374.713.631,17	20 Dok	374.713.631,17		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	170.000.000,00	4 Dok	187.000.000,00	4 Dok	205.700.000,00	4 Dok	226.270.000,00	4 Dok	248.897.000,00	20 Dok	248.897.000,00		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	76.168.530,00	3 Dok	83.785.383,00	3 Dok	92.163.921,30	3 Dok	101.380.313,43	3 Dok	111.518.344,77	15 Dok	111.518.344,77		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		48 Dokumen	48 Dokumen	7.087.654.123,00		7.798.123.554,50		8.196.991.254,62		8.616.894.454,18		9.059.023.533,95		9.059.023.533,95	Sekretariat	
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Menerima Gaji dan Tunjangan	58 Orang	58 Orang	6.961.895.953,00	100	7.658.085.548,30	100	8.040.989.825,72	100	8.443.039.317,00	100	8.865.191.282,85	100	8.865.191.282,85		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan RLH dan Penyusunan Pajak, Dokumen Laporan SPJ, Dokumen Laporan Neraca	4 Dok	4 Dok	58.278.579,00	4 Dok	64.106.436,90	4 Dok	70.517.080,59	4 Dok	77.568.788,65	4 Dok	85.325.667,51	4 Dok	85.325.667,51		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100	100	33.399.207,00	100	36.739.127,70	100	40.413.040,47	100	44.454.344,52	100	48.899.778,97	100	48.899.778,97		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Keuangan Triwulan	2 Dok	2 Dok	34.080.384,00	2 Dok	39.192.441,60	2 Dok	45.071.307,84	2 Dok	51.832.004,02	2 Dok	59.606.804,62	2 Dok	59.606.804,62		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		75%	75%	34.661.805,00		38.127.985,50		41.940.784,05		46.134.862,46		50.748.348,70		50.748.348,70	Sekretariat	
		1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Aset SKPD	1 laporan	1 laporan	34.661.805,00	1 laporan	38.127.985,50	1 laporan	41.940.784,05	1 laporan	46.134.862,46	1 laporan	50.748.348,70	1 laporan	50.748.348,70		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				395.866.000,00		228.366.000,00		145.866.000,00		145.866.000,00		145.866.000,00		145.866.000,00	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Batik Pegawai	1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	1 Paket	82.500.000,00				-		-		-		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	36 Orang	145.866.000,00	36 Orang	145.866.000,00	36 Orang	145.866.000,00	36 Orang	145.866.000,00	36 Orang	145.866.000,00	36 Orang	145.866.000,00		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	16 Orang	175.000.000,00										-		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>965.000.000,00</b>		<b>1.061.500.000,00</b>		<b>1.167.650.000,00</b>		<b>1.284.415.000,00</b>		<b>1.412.856.500,00</b>		1.412.856.500,00	<b>Sekretariat</b>	
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	12 Jenis	12 Jenis	25.000.000,00	12 Jenis	27.500.000,00	12 Jenis	30.250.000,00	12 Jenis	33.275.000,00	12 Jenis	36.602.500,00	12 Jenis	36.602.500,00		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	55.000.000,00	1 Paket	60.500.000,00	1 Paket	66.550.000,00	1 Paket	73.205.000,00	1 Paket	73.205.000,00		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	1 Paket	165.000.000,00	1 Paket	181.500.000,00	1 Paket	199.650.000,00	1 Paket	219.615.000,00	1 Paket	219.615.000,00		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan/Koran Selama 12 Bulan dan Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	1 Paket	44.000.000,00	1 Paket	48.400.000,00	1 Paket	53.240.000,00	1 Paket	58.564.000,00	1 Paket	58.564.000,00		
		1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah SKPD	100	100	700.000.000,00	100	770.000.000,00	100	847.000.000,00	100	931.700.000,00	100	1.024.870.000,00	100	1.024.870.000,00		
		<b>1.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.059.000.000,00</b>		<b>1.085.500.000,00</b>		<b>1.114.650.000,00</b>		<b>1.146.715.000,00</b>		<b>1.181.986.500,00</b>		1.181.986.500,00	<b>Sekretariat</b>	
		1.06.01.2.09.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	1 Paket	190.000.000,00	1 Paket	209.000.000,00	1 Paket	229.900.000,00	1 Paket	252.890.000,00	1 Paket	278.179.000,00	1 Paket	278.179.000,00		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleur	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	55.000.000,00	1 Paket	60.500.000,00	1 Paket	66.550.000,00	1 Paket	73.205.000,00	1 Paket	73.205.000,00		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Terlaksananya Rehab Bangunan Untuk Rumah Singgah	0	1 Paket	500.000.000,00	1 Paket	500.000.000,00	1 Paket	500.000.000,00	1 Paket	500.000.000,00	1 Paket	500.000.000,00	1 Paket	500.000.000,00		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Unit Kantor (printer dan notebook/ laptop)	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	1 Paket	27.500.000,00	1 Paket	30.250.000,00	1 Paket	33.275.000,00	1 Paket	36.602.500,00	1 Paket	36.602.500,00		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah PengadaanTangki Air, Pengadaan Menara Air, Pembangunan/Rehab Parkiran	0	1 Paket	294.000.000,00	1 Paket	294.000.000,00	1 Paket	294.000.000,00	1 Paket	294.000.000,00	1 Paket	294.000.000,00	1 Paket	294.000.000,00		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>275.000.000,00</b>		<b>302.500.000,00</b>		<b>332.750.000,00</b>		<b>366.025.000,00</b>		<b>402.627.500,00</b>		402.627.500,00	<b>Sekretariat</b>	
		1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat Selama 1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	125.000.000,00	12 Bulan	137.500.000,00	12 Bulan	151.250.000,00	12 Bulan	166.375.000,00	12 Bulan	183.012.500,00	12 Bulan	183.012.500,00		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon dan Internet /Wifi Kantor Selama 1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	165.000.000,00	12 Bulan	181.500.000,00	12 Bulan	199.650.000,00	12 Bulan	219.615.000,00	12 Bulan	219.615.000,00		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>720.000.000,00</b>		<b>739.500.000,00</b>		<b>760.950.000,00</b>		<b>784.545.000,00</b>		<b>810.499.500,00</b>		810.499.500,00	<b>Sekretariat</b>	
		1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak/Surat dan Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	45 Unit	45 Unit	155.000.000,00	45 Unit	170.500.000,00	45 Unit	187.550.000,00	45 Unit	206.305.000,00	45 Unit	226.935.500,00	45 Unit	226.935.500,00		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset (AC, Printer dan Komputer/Laptop)	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	1 Paket	44.000.000,00	1 Paket	48.400.000,00	1 Paket	53.240.000,00	1 Paket	58.564.000,00	1 Paket	58.564.000,00		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Gedung PKBI dan Gedung LBB Payak Kumang	0	1 Paket	525.000.000,00	1 Paket	525.000.000,00	1 Paket	525.000.000,00	1 Paket	525.000.000,00	1 Paket	525.000.000,00	1 Paket	525.000.000,00		Dinas Sosial PPPA dan KB Kab. Ketapang
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat pendapatannya</b>		5,71	<b>1.487.151.000,00</b>	5,71	<b>1.740.043.000,00</b>	5,71	<b>1.902.047.300,00</b>	5,71	<b>1.965.252.030,00</b>	5,71	<b>2.129.777.233,00</b>	5,71	2.129.777.233,00	<b>Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</b>	
				<b>Persentase peningkatan kelompok rentan yang terlatih</b>		33,2%		40,05		40,05		40,05		40,05		40,05	-		
		<b>1.06.02.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>		<b>4 Kecamatan</b>		<b>150.000.000,00</b>		<b>150.000.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		50.000.000,00		
		1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Calon lokasi KAT yang diobservasi, Identifikasi dan Pemetaan Sosial (PS) calon KAT	4 Kec 5 Desa	4 Kec 5 Desa	150.000.000,00	4 Kec 5 Desa	150.000.000,00	1 Kec 1 Desa	50.000.000,00	1 Kec 1 Desa	50.000.000,00	1 Kec 1 Desa	50.000.000,00	1 Kec 1 Desa	50.000.000,00		
		<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>20 TKSK/20 Kec</b>		<b>1.337.151.000,00</b>		<b>1.590.043.000,00</b>		<b>1.852.047.300,00</b>		<b>1.915.252.030,00</b>		<b>2.079.777.233,00</b>		2.079.777.233,00	<b>Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</b>	
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Karang Taruna	283 Orang	283 Orang	68.850.000,00	283 Orang	75.735.000,00	283 Orang	83.308.500,00	283 Orang	91.639.350,00	283 Orang	100.803.285,00	283 Orang	100.803.285,00		Kab. Ketapang
		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tali Asih TKSK di 20 Kecamatan	20 TKSK	20 TKSK	360.000.000,00	20 TKSK	420.000.000,00	20 TKSK	420.000.000,00	20 TKSK	420.000.000,00	20 TKSK	420.000.000,00	20 TKSK	420.000.000,00		20 Kecamatan di Kab. Ketapang
		1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di Setiap Kecamatan se Kabupaten Ketapang	20 Laporan	20 Laporan	40.280.000,00	20 Laporan	44.308.000,00	20 Laporan	48.738.800,00	20 Laporan	53.612.680,00	20 Laporan	58.973.948,00	20 Laporan	58.973.948,00		Kab. Ketapang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan sumber Kesejahteraan Sosial Yang diberikan kepada kelompok Masyarakat (Belanja hibah kepada lembaga sosial yg terdaftar)	2 usulan e-hibah	2 usulan e-hibah	668.021.000,00	2 antrian 2021	800.000.000,00	hasil verifikasi e-hibah	1.000.000.000,00	hasil verifikasi e-hibah	1.000.000.000,00	hasil verifikasi e-hibah	1.000.000.000,00	hasil verifikasi e-hibah	1.000.000.000,00		Menyebar di Kecamatan
		1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	20 Dokumen	20 Dokumen	200.000.000,00	50 Puskesmas	250.000.000,00	55 Puskesmas	300.000.000,00	55 Puskesmas	350.000.000,00	60 Puskesmas	500.000.000,00	60 Puskesmas	500.000.000,00		Kab. Ketapang
		<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase peningkatan cakupan pelayanan PPKS</b>	7,5	7,5	<b>1.048.515.650,00</b>	<b>10,5</b>	<b>1.093.109.800,00</b>	<b>13,5</b>	<b>1.144.500.077,50</b>	<b>16,5</b>	<b>1.203.794.420,13</b>	<b>19,5</b>	<b>1.272.291.371,59</b>	<b>19,5</b>	<b>1.272.291.371,59</b>		
		1.06.04.2.01	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>		20 Orang	20 Orang	121.547.000,00		138.904.050,00		158.777.157,50		181.534.981,13		207.600.603,29		207.600.603,29	<i>Bidang Rehabilitasi Sosial perlindungan dan Jaminan Sosial</i>	
		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanaan	Jumlah permakanaan bagi disabilitas	1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	1 Paket	8.250.000,00	1 Paket	9.075.000,00	1 Paket	9.982.500,00	1 Paket	10.980.750,00	1 Paket	10.980.750,00		
		1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang bagi ODGJ di kabupaten Ketapang	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	11.000.000,00	1 Paket	12.100.000,00	1 Paket	13.310.000,00	1 Paket	14.641.000,00	1 Paket	14.641.000,00		
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemberian Bantuan Kepada Penyandang Disabilitas yang Tersebar di Kabupaten Ketapang	20 Orang	20 Orang	104.047.000,00	100	119.654.050,00	110	137.602.157,50	123	158.242.481,13	137	181.978.853,29	137	181.978.853,29		
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pembinaan yang diberikan kepada disabilitas															
		1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta pembinaan untuk Keluarga Penyandang Disabilitas															
		<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>				<b>926.968.650,00</b>		<b>954.205.750,00</b>		<b>985.722.920,00</b>		<b>1.022.259.439,00</b>		<b>1.064.690.768,30</b>		1.064.690.768,30	<i>Bidang Rehabilitasi Sosial perlindungan dan Jaminan Sosial</i>	
		1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Pemulangan Kepada Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) dan Orang Terlantar (OT) ke Tempat Asalnya	18 Orang	84 Orang	77.818.000,00	120 Orang	93.381.600,00	155 Orang	112.057.920,00	190 Orang	134.469.504,00	225 Orang	161.363.404,80	225 Orang	161.363.404,80		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1.06.04.2.02.03	Penyediaan Perumahan	Jumlah Pengadaan Beras, lauk Pauk dan Akreditasi LKSA/Panti	12 Panti Asuhan	12 ton beras+ lauk pauk+ akredi-tasi panti	600.000.000,00	13 ton beras+ lauk pauk+ akredi-tasi panti	600.000.000,00	14 ton beras+ lauk pauk+ akredi-tasi panti	600.000.000,00	15 ton beras+ lauk pauk+ akredi-tasi panti	600.000.000,00	16 ton beras+ lauk pauk+ akredi-tasi panti	600.000.000,00	16 ton beras+ lauk pauk+ akredi-tasi panti	600.000.000,00		
		1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah ODGJ yang dijemput dari RSJ Provinsi Kalbar dan diserahkan kepada keluarganya	18 Orang	30 Orang	61.735.000,00	30 Orang	67.908.500,00	30 Orang	74.699.350,00	30 Orang	82.169.285,00	30 Orang	90.386.213,50	18 Orang	90.386.213,50		
		1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	0	20 Orang	132.415.650,00		132.415.650,00		132.415.650,00		132.415.650,00		132.415.650,00		132.415.650,00		
		1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Penanganan Korban Perempuan dan Anak	10 Orang	20 Orang	55.000.000,00	20 Orang	60.500.000,00	20 Orang	66.550.000,00	20 Orang	73.205.000,00	20 Orang	80.525.500,00	20 Orang	80.525.500,00		
		<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase kelompok rentan yang mendapat jaminan sosial</b>		<b>7,5</b>	<b>1.037.058.166,00</b>	<b>10,5</b>	<b>1.451.578.073,00</b>	<b>13,5</b>	<b>2.052.996.384,70</b>	<b>16,5</b>	<b>2.928.741.896,09</b>	<b>19,5</b>	<b>4.207.762.057,93</b>	<b>19,5</b>	<b>4.207.762.057,93</b>	<b>Bidang Rehabilitasi Sosial perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	
		<b>1.06.05.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>				<b>177.017.680,00</b>		<b>194.719.448,00</b>		<b>214.191.392,80</b>		<b>235.610.532,08</b>		<b>259.171.585,29</b>		<b>259.171.585,29</b>		
		1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Pemberian Bantuan Kepada Anak-anak terlantar di Kabupaten Ketapang		50 Orang	77.017.680,00	120	84.719.448,00	160	93.191.392,80	200	102.510.532,08	240	112.761.585,29	240	112.761.585,29		
		1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-anak terlantar	Jumlah Pembinaan Anak terlantar		80	50.000.000,00	120	55.000.000,00	160	60.500.000,00	200	66.550.000,00	240	73.205.000,00	240	73.205.000,00		
		1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Verifikasi Anak terlantar		1 Dok	50.000.000,00	120	55.000.000,00	160	60.500.000,00	200	66.550.000,00	240	73.205.000,00	240	73.205.000,00		
		<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>860.040.486,00</b>		<b>1.256.858.625,00</b>		<b>1.838.804.991,90</b>		<b>2.693.131.364,01</b>		<b>3.948.590.472,64</b>		<b>3.948.590.472,64</b>	<b>Bidang Rehabilitasi Sosial perlindungan dan</b>	
		1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima manfaat jaminan sosial nasional DTKS yang diverifikasi dan validasi		30.514 KPM	164.980.500,00	57.334 KPM	247.470.750,00	84.154 KPM	371.206.125,00	110.954 KPM	556.809.187,50	137.794 KPM	835.213.781,25	137.794 KPM	835.213.781,25		
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan KPM yang mendapat pembinaan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)			363.038.946,00		544.558.419,00		816.837.628,50		1.225.256.442,75		1.837.884.664,13		1.837.884.664,13		
		1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapat bantuan		20 UEP KUBE	332.021.040,00	25 UEP KUBE dan 50 Rumah	464.829.456,00	30 UEP KUBE dan 70 Rumah	650.761.238,40	35 UEP KUBE dan 90 Rumah	911.065.733,76	50 UEP KUBE dan 100 Rumah	1.275.492.027,26	50 UEP KUBE dan 100 Rumah	1.275.492.027,26		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase masyarakat korban bencana yang mendapat penanganan sosial		5	312.220.730,00	5	343.442.803,00	5	377.787.083,30	5	415.565.791,63	5	457.122.370,79	5	457.122.370,79	Bidang Rehabilitasi Sosial perlindungan dan Jaminan Sosial	
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				105.589.110,00		116.148.021,00		127.762.823,10		140.539.105,41		154.593.015,95		154.593.015,95		
		1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah bantuan penyediaan makanan bagi Korban bencana alam		1 Paket	34.833.180,00	150	38.316.498,00	170	42.148.147,80	190	46.362.962,58	210	50.999.258,84	210	50.999.258,84		
		1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Bantuan Penyediaan Sandang Bagi Korban Bencana Alam		1 Paket	70.755.930,00	80	77.831.523,00	90	85.614.675,30	100	94.176.142,83	110	103.593.757,11	110	103.593.757,11		
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				206.631.620,00		227.294.782,00		250.024.260,20		275.026.686,22		302.529.354,84		302.529.354,84		
		1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Tagana yang Siap Siaga Bencana di 20 Kecamatan		6	55.476.720,00	9	61.024.392,00	13	67.126.831,20	16	73.839.514,32	20	81.223.465,75	20	81.223.465,75		
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Laporan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		1 Dokumen	151.154.900,00	10	166.270.390,00	13	182.897.429,00	16	201.187.171,90	20	221.305.889,09	20	221.305.889,09		
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan pengelolaan taman makam pahlawan		100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	600.000.000,00	100	800.000.000,00	100	800.000.000,00	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			100	500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
		1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan pengelolaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana areal Taman Makam Pahlawan Tanjungpura Ketapang		7.255 M2	500.000.000,00	7.255 M2	500.000.000,00	7.255 M2	500.000.000,00	7.255 M2	600.000.000,00	7.255 M2	800.000.000,00	7.255 M2	800.000.000,00		TMP Delta Pawan
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.030.068.743,00		1.147.255.481,30		1.280.414.852,63		1.432.420.308,05		1.606.815.500,07		1.606.815.500,07	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM perempuan	67.80	67.80	190.598.950,00	71.56	209.658.845,00	72.67	230.624.729,50	73.46	253.687.202,45	74.02	279.055.922,70	74.02	279.055.922,70		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				135.598.950,00		149.158.845,00		164.074.729,50		180.482.202,45		198.530.422,70		198.530.422,70		
		2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan PUG dalam Daerah		5 Dokumen	38.825.000,00	9 Kec	42.707.500,00	10 Kec	46.978.250,00	11 Kec	51.676.075,00	12 Kec	56.843.682,50	12 Kec	56.843.682,50		
		2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Laporan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender		6 Dokumen	96.773.950,00	6 Kec	106.451.345,00	7 Kec	117.096.479,50	8 Kec	128.806.127,45	9 Kec	141.686.740,20	9 Kec	141.686.740,20		
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			66%	55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		80.525.500,00		80.525.500,00		
		2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Laporan Terlaksananya Advokasi Kebijakan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		1 Dokumen	55.000.000,00	5 Kec	60.500.000,00	6 Kec	66.550.000,00	7 Kec	73.205.000,00	8 Kec	80.525.500,00	8 Kec	80.525.500,00		
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan kerja sama antar lembaga (LSM)		50	213.579.830,00	55	234.937.813,00	55	258.431.594,30	55	284.274.753,73	60	312.702.229,10	60	312.702.229,10		
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			55	87.155.000,00		95.870.500,00		105.457.550,00		116.003.305,00		127.603.635,50		127.603.635,50		
		2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya data koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan		3 Dokumen	40.000.000,00	20 Kec	44.000.000,00	20 Kec	48.400.000,00	20 Kec	53.240.000,00	20 Kec	58.564.000,00	20 Kec	58.564.000,00		Kab. Ketapang
		2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan		1 Dokumen	47.155.000,00	8 Kec	51.870.500,00	10 Kec	57.057.550,00	11 Kec	62.763.305,00	12 Kec	69.039.635,50	12 Kec	69.039.635,50		
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			55	40.082.675,00		44.090.942,50		48.500.036,75		53.350.040,43		58.685.044,47		58.685.044,47		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan		1 Dokumen	16.082.675,00	80 Kasus	17.690.942,50	100 Kasus	110 Kasus	21.406.040,43	120 Kasus	23.546.644,47	120 Kasus	23.546.644,47			
		2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan koordinasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan		4 dokumen	24.000.000,00	9 Kec	26.400.000,00	10 Kec	29.040.000,00	12 Kec	31.944.000,00	12 Kec	35.138.400,00	12 Kec	35.138.400,00		
		2.08.03.2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			55	<b>86.342.155,00</b>		<b>94.976.370,50</b>		<b>104.474.007,55</b>		<b>114.921.408,31</b>		<b>126.413.549,14</b>		<b>126.413.549,14</b>		
		2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terbentuknya UPTD PPA kewenangan Kabupaten/Kota secara optimal		100	16.135.690,00	20 Kec	17.749.259,00	20 Kec	19.524.184,90	20 Kec	21.476.603,39	20 Kec	23.624.263,73	20 Kec	23.624.263,73		
		2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota		1 Dokumen	16.135.690,00	20 Kec	17.749.259,00	20 Kec	19.524.184,90	20 Kec	21.476.603,39	20 Kec	23.624.263,73	20 Kec	23.624.263,73		
		2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran perempuan korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus agar dapat berkembang dan berdaya.		100%	30.000.000,00	100%	33.000.000,00	100%	36.300.000,00	100%	39.930.000,00	100%	43.923.000,00	100%	43.923.000,00		
		2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan		2 Dokumen	24.070.775,00	100%	26.477.852,50	100%	29.125.637,75	100%	32.038.201,53	100%	35.242.021,68	100%	35.242.021,68		
		2.08.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase Tersedianya Data Gender dan Anak</b>		100	<b>42.300.795,00</b>	100	<b>46.530.874,50</b>	100	<b>51.183.961,95</b>	100	<b>56.302.358,15</b>	100	<b>61.932.593,96</b>	100	<b>61.932.593,96</b>		
		2.08.05.2.01	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>42.300.795,00</b>		<b>46.530.874,50</b>		<b>51.183.961,95</b>		<b>56.302.358,15</b>		<b>61.932.593,96</b>		61.932.593,96		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota		1 Dokumen	19.626.245,00	3 Kec	21.588.869,50	3 Kec	23.747.756,45	4 Kec	26.122.532,10	4 Kec	28.734.785,30	4 Kec	28.734.785,30		
		2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data Anak		80%	22.674.550,00	3 Kec	24.942.005,00	3 Kec	27.436.205,50	4 Kec	30.179.826,05	4 Kec	33.197.808,66	4 Kec	33.197.808,66		
		<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase peningkatan Keterpenuhan Indikator Kota Layak Anak</b>		<b>50</b>	<b>241.200.880,00</b>	<b>55</b>	<b>274.569.532,00</b>	<b>55</b>	<b>314.049.618,40</b>	<b>55</b>	<b>361.084.653,40</b>	<b>60</b>	<b>417.512.213,85</b>	<b>60</b>	<b>417.512.213,85</b>		
		<b>2.08.06.2.01</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>194.958.060,00</b>		<b>214.453.866,00</b>		<b>235.899.252,60</b>		<b>259.489.177,86</b>		<b>285.438.095,65</b>		<b>285.438.095,65</b>		
		2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerntah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	44.958.060,00		49.453.866,00		54.399.252,60		59.839.177,86		65.823.095,65		65.823.095,65		
		2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Penyelenggaraan Hari Anak Nasional		1 Dokumen	150.000.000,00	150 Peserta	165.000.000,00	200 Peserta	181.500.000,00	250 Peserta	199.650.000,00	250 Peserta	219.615.000,00	250 Peserta	219.615.000,00		
		<b>2.08.06.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>46.242.820,00</b>		<b>60.115.666,00</b>		<b>78.150.365,80</b>		<b>101.595.475,54</b>		<b>132.074.118,20</b>		<b>132.074.118,20</b>		
		2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak		1 Dokumen	26.543.080,00	75 Peserta	34.506.004,00	75 Peserta	44.857.805,20	75 Peserta	58.315.146,76	75 Peserta	75.809.690,79	75 Peserta	75.809.690,79		
		2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan antar lembaga		1 Dokumen	19.699.740,00	100 Peserta (4 Kec)	25.609.662,00	100 Peserta (4 Kec)	33.292.560,60	120 Peserta (4 Kec)	43.280.328,78	120 Peserta (4 Kec)	56.264.427,41	120 Peserta (4 Kec)	56.264.427,41		
		<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>		<b>50</b>	<b>342.388.288,00</b>	<b>55</b>	<b>381.558.416,80</b>	<b>55</b>	<b>426.124.948,48</b>	<b>55</b>	<b>477.071.340,33</b>	<b>60</b>	<b>535.612.540,46</b>	<b>60</b>	<b>535.612.540,46</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				36.406.388,00		44.978.326,80		55.886.849,48		69.809.431,43		87.624.440,67		87.624.440,67		
		2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak		2 Dokumen	24.656.500,00	100 Peserta (4 Kec)	32.053.450,00	150 Peserta (5 Kec)	41.669.485,00	150 Peserta (5 Kec)	54.170.330,50	150 Peserta (5 Kec)	70.421.429,65	150 Peserta (5 Kec)	70.421.429,65		
		2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak		2 Dokumen	11.749.888,00	4 Kec	12.924.876,80	4 Kec	14.217.364,48	4 Kec	15.639.100,93	4 Kec	17.203.011,02	4 Kec	17.203.011,02		
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				305.981.900,00		336.580.090,00		370.238.099,00		407.261.908,90		447.988.099,79		447.988.099,79		
		2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	25 Orang	50 Orang	305.981.900,00	21 Orang	336.580.090,00	18 Orang	370.238.099,00	15 Orang	407.261.908,90	18 Orang	447.988.099,79	18 Orang	447.988.099,79		
Meningkatnya kualitas pertumbuhan penduduk	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9.205.969.844,00		9.451.769.028,40		9.722.148.131,24		10.019.565.144,36		10.346.723.858,80		10.346.723.858,80	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	8,3%	13,00%	2.311.280.000,00	7,70%	2.455.780.000,00	7,40%	2.614.730.000,00	7,40%	2.789.575.000,00	7,40%	2.981.904.500,00	7,40%	2.981.904.500,00		
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				640.000.000,00		704.000.000,00		774.400.000,00		851.840.000,00		937.024.000,00		937.024.000,00		
		2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/kota	Persentase Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		100%	300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		439.230.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Survei / Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan		1 Dokumen	115.000.000,00	1 Dokumen	126.500.000,00	1 Dokumen	139.150.000,00	1 Dokumen	153.065.000,00	1 Dokumen	168.371.500,00	5 Dokumen	168.371.500,00		
		2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan pendidik jenjang SD/MI, SLTP/MTS, SLTA jalur formal dan informal	Persentase terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidik jenjang SD/MI, SLTP/MTS, SLTA Jalur Formal dan Informal	0	100%	225.000.000,00	100%	247.500.000,00	100%	272.250.000,00	100%	299.475.000,00	100%	329.422.500,00	100%	329.422.500,00		
		<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>1.671.280.000,00</b>		<b>1.751.780.000,00</b>		<b>1.840.330.000,00</b>		<b>1.937.735.000,00</b>		<b>2.044.880.500,00</b>		<b>2.044.880.500,00</b>		
		2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan		1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	242.000.000,00	1 Dokumen	266.200.000,00	1 Dokumen	292.820.000,00	5 Dokumen	292.820.000,00		
		2.14.02.2.02.08	Membentuk rumah data kependudukan di kampung kb untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain	Jumlah Dokumen Pelaporan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB		1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	330.000.000,00	1 Dokumen	363.000.000,00	1 Dokumen	399.300.000,00	1 Dokumen	439.230.000,00	5 Dokumen	439.230.000,00		
		2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Sasaran yang Menyediakan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Informasi Keluarga		20 Kec	165.000.000,00	20 Kec	181.500.000,00	20 Kec	199.650.000,00	20 Kec	219.615.000,00	20 Kec	241.576.500,00	20 Kec	241.576.500,00		
		2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		1 Dokumen	85.000.000,00	1 Dokumen	93.500.000,00	1 Dokumen	102.850.000,00	1 Dokumen	113.135.000,00	1 Dokumen	124.448.500,00	5 Dokumen	124.448.500,00		
		2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (DAK)	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		1 Dokumen	866.280.000,00	1 Dokumen	866.280.000,00	1 Dokumen	866.280.000,00	1 Dokumen	866.280.000,00	1 Dokumen	866.280.000,00	5 Dokumen	866.280.000,00		
		2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	60.500.000,00	1 Dokumen	66.550.000,00	1 Dokumen	73.205.000,00	1 Dokumen	80.525.500,00	5 Dokumen	80.525.500,00		
13		<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Peningkatan Partisipasi Kelompok Ketahanan Keluarga</b>		<b>25</b>	<b>5.159.053.606,00</b>	<b>27</b>	<b>5.238.899.166,60</b>	<b>28</b>	<b>5.326.729.283,26</b>	<b>29</b>	<b>5.423.342.411,59</b>	<b>30</b>	<b>5.529.616.852,74</b>	<b>30</b>	<b>5.529.616.852,74</b>		
		<b>2.14.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>				<b>2.706.986.106,00</b>		<b>2.725.172.916,60</b>		<b>2.745.178.408,26</b>		<b>2.767.184.449,09</b>		<b>2.791.391.093,99</b>		<b>2.791.391.093,99</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK)	Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Orientasi Lini Lapangan, Pembinaan Kader, Penyuluhan KB dan Pengolahan Data.		1 Dokumen	1.300.096.000,00	1 Dokumen	1.300.096.000,00	1 Dokumen	1.300.096.000,00	1 Dokumen	1.300.096.000,00	1 Dokumen	1.300.096.000,00	5 Dokumen	1.300.096.000,00		
		2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan KIE Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		1 Dokumen	59.868.106,00	1 Dokumen	65.854.916,60	1 Dokumen	72.440.408,26	1 Dokumen	79.684.449,09	1 Dokumen	87.652.893,99	5 Dokumen	87.652.893,99		
		2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media massa (cetak dan elektronik) serta media luar ruang yang dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi Program KKBPK		1 Dokumen	122.000.000,00	1 Dokumen	134.200.000,00	1 Dokumen	147.620.000,00	1 Dokumen	162.382.000,00	1 Dokumen	178.620.200,00	5 Dokumen	178.620.200,00		
		2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK)	Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		1 Dokumen	115.360.000,00	1 Dokumen	115.360.000,00	1 Dokumen	115.360.000,00	1 Dokumen	115.360.000,00	1 Dokumen	115.360.000,00	5 Dokumen	115.360.000,00		
		2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK (DAK)	Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Pelayanan KB		1 Dokumen	1.109.662.000,00	1 Dokumen	1.109.662.000,00	1 Dokumen	1.109.662.000,00	1 Dokumen	1.109.662.000,00	1 Dokumen	1.109.662.000,00	5 Dokumen	1.109.662.000,00		
		<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>				<b>1.660.710.000,00</b>		<b>1.660.710.000,00</b>		<b>1.660.710.000,00</b>		<b>1.660.710.000,00</b>		<b>1.660.710.000,00</b>		<b>1.660.710.000,00</b>		
		2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (DAK)	Jumlah Dokumen Pelaporan Sarana Pendukung Oprasional PKB/PLKB		1 Dokumen	400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
		2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pergerakan, Pelayanan dan Pembangunan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Peuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) (DAK)	Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Rakor dan Sosialisasi Program Bangsa Kencana		1 Dokumen	222.310.000,00		222.310.000,00		222.310.000,00		222.310.000,00		222.310.000,00		222.310.000,00		
		2.14.03.2.02.04	Pergerakan Kader Instusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK)	Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Mekop Lini Lapangan di Kampung KB, Pelaksanaan KIE dan Pemutakhiran Data pada BPKBD dan Sub BPKBD		1 Dokumen	1.038.400.000,00		1.038.400.000,00		1.038.400.000,00		1.038.400.000,00		1.038.400.000,00		1.038.400.000,00		
		<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>377.357.500,00</b>		<b>397.616.250,00</b>		<b>419.900.875,00</b>		<b>444.413.962,50</b>		<b>471.378.358,75</b>		<b>471.378.358,75</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan dan Jejarinya	Jumlah Dokumen Pelaporan Pembinaan Jejaring/Jaringan di Kecamatan, Visitasi dan Registrasi di Paskes, Pendistribusian ALOKON dan NON ALOKON di KKB		1 Dokumen	82.355.000,00		90.590.500,00		99.649.550,00		109.614.505,00		120.575.955,50		120.575.955,50		
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Pelayanan KB Kes TNI, POLRI dan PKK		1 Dokumen	120.232.500,00		132.255.750,00		145.481.325,00		160.029.457,50		176.032.403,25		176.032.403,25		
		2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK)	Jumlah Dokumen Pelaporan Sarana Penunjang Pelayanan KB		1 Dokumen	174.770.000,00		174.770.000,00		174.770.000,00		174.770.000,00		174.770.000,00		174.770.000,00		
		<b>2.14.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>				<b>414.000.000,00</b>		<b>455.400.000,00</b>		<b>500.940.000,00</b>		<b>551.034.000,00</b>		<b>606.137.400,00</b>		<b>606.137.400,00</b>		
		2.14.03.2.01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		1 Dokumen	100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		146.410.000,00		
		2.14.03.2.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		1 Dokumen	109.000.000,00		119.900.000,00		131.890.000,00		145.079.000,00		159.586.900,00		159.586.900,00		
		2.14.03.2.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		1 Dokumen	100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		146.410.000,00		
		2.14.03.2.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah dokumen pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB		1 Dokumen	105.000.000,00		115.500.000,00		127.050.000,00		139.755.000,00		153.730.500,00		153.730.500,00		
14		<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase Keluarga yang mendapat pembinaan reproduksi</b>		<b>31,46</b>	<b>1.735.636.238,00</b>	<b>35,86</b>	<b>1.757.089.861,80</b>	<b>37,46</b>	<b>1.780.688.847,98</b>	<b>37,46</b>	<b>1.806.647.732,78</b>	<b>37,46</b>	<b>1.835.202.506,06</b>	<b>37,46</b>	<b>1.835.202.506,06</b>		
		<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				<b>1.670.240.655,00</b>		<b>1.685.154.720,50</b>		<b>1.701.560.192,55</b>		<b>1.719.606.211,81</b>		<b>1.739.456.832,99</b>		<b>1.739.456.832,99</b>		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Persentase meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan tentang Indeks Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga			59.140.655,00		65.054.720,50		71.560.192,55		78.716.211,81		86.587.832,99		86.587.832,99		
		2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,P IK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK)	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga			461.700.000,00		461.700.000,00		461.700.000,00		461.700.000,00		461.700.000,00		461.700.000,00		
		2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan tentang Indeks Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga			55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		80.525.500,00		80.525.500,00		
		2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,P IK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK)	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			452.000.000,00		452.000.000,00		452.000.000,00		452.000.000,00		452.000.000,00		452.000.000,00		
		2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang tua hebat,Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (DAK)	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang tua hebat,Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			607.400.000,00		607.400.000,00		607.400.000,00		607.400.000,00		607.400.000,00		607.400.000,00		
		2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Persentase Terlaksananya Advokasi dan Promosi IPK			35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		51.243.500,00		51.243.500,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				65.395.583,00		71.935.141,30		79.128.655,43		87.041.520,97		95.745.673,07		95.745.673,07		
		2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Meningkatnya jaringan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan, mitra kerja lintas sektoral dalam pelaksanaan program pembinaan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok ketahanan keluarga			33.457.500,00		36.803.250,00		40.483.575,00		44.531.932,50		48.985.125,75		48.985.125,75		
		2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Persentase Meningkatnya jaringan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan, mitra kerja lintas sektoral dalam pelaksanaan program pembinaan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok ketahanan keluarga			31.938.083,00		35.131.891,30		38.645.080,43		42.509.588,47		46.760.547,32		46.760.547,32		
<b>JUMLAH TOTAL.....</b>							<b>25.660.269.043,00</b>		<b>27.533.129.005,90</b>		<b>29.348.236.476,26</b>		<b>31.624.233.975,94</b>		<b>34.619.229.250,78</b>				

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026. Rencana Strategis merupakan acuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Bab ini membahas indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak.

**Tabel T-C 28**

#### INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS)	14,18	10,64	8,87	7,09	5,32	3,55	3,55
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,10	70,01	71,56	72,67	73,46	74,02	74,02
3	Total Fertility Rate (TFR)	n/a	2,21	2,19	2,10	2,10	2,29	2,29

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2021-2026 merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain itu sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

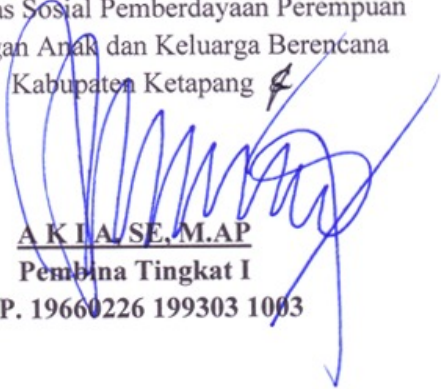
Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana disusun sebagai rancangan kegiatan 5 (lima) tahunan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang mengacu kepada Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang setiap tahun.

Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional serta berkesinambungan.

Ketapang, Agustus 2021

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan  
Perindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Ketapang

  
**A K I A / S E . M . A P**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660226 199303 1003